PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015
(Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh :

GUNTUR ARDYAN TAMARA

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

ABSTRAK

PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 (Studi perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

Guntur Ardyan Tamara

Pelaksanaan kontestan politik lokal di Provinsi Lampung telah dilaksanakan pada akhir tahun 2015 dan diikuti oleh delapan Kabupaten/Kota, salah satu Kabupaten yang ikut serta ialah Kabupaten Lampung Selatan. Terjadinya angka penurunan tingkat partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Lampung Selatan, Jika pada tahun 2010 angka partisipsai mencapai 72%, sedangkan pada tahun 2015 angka partisipasi politik hanya mencapai 65%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian *eksplanatory*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 245 orang yang terbagi atas 117 orang untuk Kelurahan Way Urang dan 128 untuk Kelurahan Bumi Agung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional area random sampling*. Hasil yang diperoleh bahwa masyarakat Kelurahan Way Urang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas, sedangkan masyarakat Kelurahan Bumi Agung memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah. Hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif (Ha) dengan taraf signifkansi 5% (a=0,05) yang artinya adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik yang signifikan. Adapun koefisien korelasi Kelurahan Way Urang Sebesar 57,2% , Kelurahan Bumi Agung 52,8%, dan dari hasil kalkulasi dua kelurahan tersebut 76,5%. Besarnya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik baik di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung adalah 76,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Status Sosial Ekonomi, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC STATUS TOWARDS POLITICAL PARTICIPATION IN REGIONAL ELECTION DISTRICT SOUTH LAMPUNG IN 2015
(A Comparative Study Between Way Urang Village and Bumi Agung Village, Sub-district of Kalianda, South Lampung)

By

Guntur Ardyan Tamara

Implementation of the local political contestants in Lampung province have been carried out in late 2015 and was followed by eight District / City, one of the district who participate are South Lampung regency. The occurrence rate of decline in the participation rate of local elections in 2015 when compared to local elections in 2015 in South Lampung regency, if in 2010 partisipsai figure reached 72%, whereas in 2015 only political participation rate reached 65%. This study aims to determine the effect of socioeconomic status on people's political participation in local elections in the Way Urang Village and Bumi AgungVillage. This type of research uses explanatory research type. The sample in this study amounted to 245 people, divided over 117 people to the Way Urang Village and 128 for the Bumi Agung Village. The sampling technique used in this research is proportional random sampling area. The results that have Way Urang Village community socioeconomic status of middle to top, while Bumi Agung Village community have a social status to middle income to under. The most accepted hypothesis is the alternative hypothesis (Ha) with significance level of 5% (a = 0.05), which means that the influence of socio-economic status to political participation significantly. The correlation coefficient Way Urang Village much as 57.2%, 52.8% Bumi Agung village, and the results of calculations of the two villages 76.5%. The magnitude of the effect of socio economic status on political participation both in the Way Urang Village and Bumi Agung Village is 76.5% and the rest influenced by other factors.

Keywords: Regional Elections, Socio-Economic Status, Political Participation.

PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015
(Studi perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

Guntur Ardyan Tanara

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : *Guntur Ardyan Tamara*

No. Pokok Mahasiswa : **1216021049**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.** .....

Penguji : **Dr. Suwondo, M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **10 November 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya, pendapat yang saya tulis atau publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 November 2016

Yang Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
71747AEF133014240
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Guntur Ardyan Tamara
NPM. 1216021049

RIWAYAT HIDUP

Guntur Ardyan Tamara dilahirkan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Maret 1994, merupakan putra dari Bapak Abdul Haris Munandar. S.E, M.M. dan Ibu Maryani, S.E, M.M. peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yakni Deni Ardyan Nataalam, dan Kurnia Ardyan Insani.

Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menyelesaikan pendidikan TK DEPAG pada tahun 2000, selanjutnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa-Rawa dari tahun 2000 hingga 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kalianda 2009. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. .Pada tahun 2015 di akhir bulan Juli, Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran selama 60 hari.

MOTTO

Barang bersyukur atas nikmatku maka akan kutmabah nikmatnya, dan barang siapa kufur atas nikmatku sesungguhnya azabku sangatlah pedih
(Qs. Ibrohim Ayat 7)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong, sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar

(Al-Baqoroh: 153)

Menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan muslimah

(HR. Ibnu Majah)

Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Niscaya allah memudahkannya jalan menuju surga

(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas rahmad dan ridho ALLAH SWT, yang senantiasa telah memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, nikmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas,
Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW

Ku persembahkan karya yang sederhana ini untuk…

Kedua orang tuaku, yang telah melahirkanku, yang selalu sabar dan mendo'akan setulus hati setiap langkahku, memberi nasihat serta semangat di kala aku jatuh. Ibu adalah sumber kekuatan ku. Untuk ayah yang senantiasa memberi motifasi dalam setiap kehidupanku semasa kecil, aku berharap kau melihatku tumbuh dan dapat memberikan sebuah kebanggaan kepadamu. Untuk Ayah dan Ibu maaf karena aku belum bisa menanamkan kebahagiaan di wajah kalian, maaf aku belum bisa menanamkan kebanggaan di hati kalian, terima kasih untuk semuanya kepada Ayah dan Ibu untuk cinta dan do'a yang selalu kau panjatkan untukku.

Terimakasih untuk saudara dan saudariku. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian kalian serta sudah memberikan motivasi kepadaku dan menjadi teladan bagiku.

Bapak/Ibu pembimbing dan penguji yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaraan yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik, terimakasih bapak/ibu pembimbing dan penguji jasa kalian akan selalu terpatri dihati.

Sahabat-sahabat ilmu pemerintahan seperjuangan, serta

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak A. Haris. M, S.E, M.M dan Ibu Maryani, S.E, M.M, ada alasan tertentu yang membuat saya meletakkan nama orang-orang tercinta di urutan pertama. Ribuan kata terimakasih dan jutaan materi rasanya tidak cukup untuk membalas budi

kalian. Terimakasih setulus dan sebanyak-banyaknya, atas do'a, ridho, restu, dukungan, dan semangatnya selama ini. Terimakasih telah menjadi orangtua yang luar biasa, telah mendidik saya dengan baik sehingga saya menjadi seperti ini. Terimakasih juga selama proses penyusunan skripsi ini kalian sepenuhnya memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan tanpa pernah mengeluh atas ketertinggalan saya dari target untuk dapat menyandang gelar Sarja Ilmu Pemerintahan (S.IP).

2. Adik-adik saya yang bernama Deni Ardyan Nataalam, dan Kurnia Ardyan Insani. Terimakasih atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
5. Bapak Drs. Piping Pria Setiangga, M.Si selaku pembimbing akademik saya, terima kasih atas bimbingan arahan serta masukan yang telah bapak berikan kepada saya. Terhitung sejak awal saya resmi menjadi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintaham hingga sampai pada proese penyelesai tugas akhir saya.
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Pembimbing Utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, saran, kritik, dan masukannya selama ini terutama dalam proses penyusunan skripsi selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan ibu.
7. Bapak Dr. Suwondo, M.A selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. Terimakasih untuk masukan dan saran-sarannya mulai dari proses

pembelajaran di kelas, seminar proposal, seminar hasil, hingga proses skripsi ini terselesaikan.

8. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.S.i, yang sudah memberikan masukan, dan motivasi kepada saya terhitung semenjak saya resmi menjadi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan hingga saat ini
9. Bapak Budiharjo, S.Sos, M.IP, terima kasih yang sudah mengarahkan saya memberikan banyak nasihat dan motivasi serta yang selalu memberikan bantuan dalam bentuk apapun selama ini.
10. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan ke depannya.
11. Pihak Dinas Kesbangpol Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Kecamatan Kalianda. Kantor Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung dan Masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi agung yang telah bersedia menjadi responden saya dalam penelitian di lapangan untuk melengkapi data skripsi ini.
12. Teman seangkatan Ananda Putri Sujatmiko, yang telah banyak membantu dan mengajarkan dalam proses penyusunan skripsi ini terutama dalam penyusunan proposal menuju ke seminar usul.
13. Sahabat karibku Dona Ervina Ali, yang telah memberikan support dari awal penyusunan skripsi ini hingga sampai tahap akhir penyelesaian skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).

14. Teman-teman seperjuangan : Dedek Renaldo, Dwi dian Kusuma, Budi Santoso, Yoga Swasono, Bagas Aji Satrio, Rizki Pranata,Evan Sarli,Wahid Nur Rohman, Khoirul Anwar, Luthfi imam Muttaqin, M. Nur Abdilah, Primadya Rosa Ayu anggraeni, Lintang Yunita, Maya Yuliantina, Ari Herina, Eri Rosalia, dan Nasira.
15. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 tanpa terkecuali.
16. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya.
17. Untuk teman terdekat di kampus Dedek Renaldo, Dwi dian Kusuma, Budi Santoso, Wahid Nur Rohman, Ari Hervina, Primadya Rosa Ayu Anggraeni. Terimakasih sudah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan terimakasih menjadi teman yang baik selama saya kuliah di ilmu pemerintahan.
18. Terima kasih kepada staf Jurusan ilmu pemerintahan, ibu rianti, mas bambang, dan pakde jum yang telah banyak membantu dari awal proses seminar usul hingga sampai proses perolehan galar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
19. Terima Kasih Kepada Ibu Ismiyati selaku dosen pembimbing lapangan saat KKN. Terima kasih atas pembelajaran yang sangat berharga yang saya terima selama ber-KKN 60 hari di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
20. Terima kasih kepada bapak Budi Santoso selaku induk semang saat kkn. Terima kasih atas do’a dukungan semangat yang bapak berikan hingga saat

ini, dan juga terima kasih untuk adik-adikku nando dan amanda terima kasih atas do'anya.

21. Teman-teman KKN Posdaya Pesawaran Indah yang saya banggakan, egy, ferly, esha, fahmi, gdaro, eri, romi, nico,ferdinan, febita, hana, shafira, anisa, vany, gita, ike, niar, ernia, aida, mirta, rizka, rika, dan fatia. Terima kasih telah berjuang bersama-sama baik suka ataupun duka saat KKN di desa Pesawaran Indah Kabupaten Pesawaran selama 60 hari.
22. Teman-teman SMA saya Abi Bayu Zandikal, Wirawan Rio, Tri Herdiansyah, Jiko Kuswanto, Yoza Mardiaz fani. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan selalu bersama saya baik suka ataupun duka.
23. Teman-teman semasa kecil sampai sekarang yang bernama Saepullah, Tono, Alvin, dan Aria Yudistira. Terima Kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu meberikan dukungan kepada saya hingga sekarang

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, 8 Novmeber 2016
Penulis

Guntur Ardyan Tamara

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel v

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 11

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Partisipasi Politik 13
1. Pengertian Partisipasi Politik 13
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 16
3. Fungsi Partisipasi 19
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Maysarakat 20
5. Faktor Penyebab Seseorang Tidak Ikut Berpartisipasi Politik 20
6. Faktor Pendorong Seseorang Ikut Berpartiasipasi Politik 23

B. Tinjauan Tentang Status Sosial Ekonomi 24
1. Penegertian Status Sosial Ekonomi 24
2. LandasanTeori (*stratification*) 27

C. Tinjaun Tentang Pemilihan Kepala Daerah 33
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 33
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah 35
3. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah 36

D. Kerangka Pikir 38
E. Hipotesis 40

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 41
B. Variabel 42
C. Definisi Konseptual 44
D. Definisi Operasional 47
E. Waktu dan Lokasi Penelitian 49
F. Jenis Data Penelitian 50
G. Sumber Data 51
H. Populasi dan Sampel Penelitian 53
I. Teknik Pengumpulan Data 59
J. Teknik Pengolahan Data 60
K. Skala Pengukuran 62
L. Uji Intstrumen Penelitian 64
M. Teknik Analisis Data 69
N. Uji Hipotesis 71

IV. GAMABARAN UMUM
A. Sejarah Kabupaten Lampung Selatan 75
1. Keadaan Umum 75
2. Letak Kabupaten Lampung Selatan 79
3. Sejarah Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan 80
B. Sejarah Kecamatan Kalianda 80
1. Keadaan Umum 80
2. Topografi Kecamatan Kalianda 83
3. Sejarah Paritispasi Politik Masyarakat Kecamatan Kalianda 84
C. Sejarah Kelurahan Way Urang 84
1. Keadaan Umum 84
2. Topografi Kelurahan Way Urang 86
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Way Urang 87
D. Sejarah Kelurahan Bumi Agung 88
1. Keadaan Umum 88
2. Topografi Kelurahan Bumi Agung 89
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Bumi Agung 90

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 92
B. Karakteristik Responden Berdasarkan Identitas Responden 93
1. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur 93
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 94

C. Analisis Data Berdasarkan Variabel 96
1. Analisis Data Berdasarkan Variabel X Status Sosial Ekonomi 96
a) Tingkat Pendapatan 96
b) Jenis Pekerjaan 99
c) Tingkat Pendidikan 101
d) Ukuran Kekayaan/Aset 104
e) Ukuran Kekuasaan/Jabatan 107
2. Analisis Data Distribusi Frekuensi Kumulatif Variabel X Status Sosial Ekonomi 110
3. Analisis Data Berdasarkan Variabel Y Partisipasi Politik 113
a) Menjadi Partisipan dalam Pemungutan Suara 113
b) Partispasi dalam Diskusi Politik Informal 116
c) Partisipasi dalam Rapat Umum 120
d) Mengikuti Kampanye Partai Politik/Calon Kepala Daerah 122
e) Kenaggotaan Aktif/Pasif Organisasi Politik 125
4. **Analisis Data Distribusi Frekuensi Kumulatif Variabel Y Partisipasi Politik** 128
D. Teknik Analisis Data 131
1. Uji Normalitas 131
2. Uji Korelasi 135
2. Uji Regresi Linear Sederhana 139
3. Uji Koefisien Determinasi 143
4. Uji Hipotesis 155
E. Pembahasan 157

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 168
B. Saran 170

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Tingkat Partisipasi masyarakat di empat kecamatan 4
2. Tingkat Partisipasi Kelurahan Way Urang dan
   Kelurahan Bumi Agung 5
3. Kerangka Pikir Penelitian 40
4. Hasil Uji Normalitas Variabel X
   Kelurahan Way Urang.....131
5. Hasil Uji Normalitas Variabel Y
   Kelurahan Way Urang.....132
6. Hasil Uji Normalitas Variabel X
   Kelurahan Bumi Agung 133
7. Hasil Uji Normalitas Variabel X
   Kelurahan Bumi Agung 133
8. Hasil Uji Nirmalitas Variabel X
   Kalkulasi 134
9. Hasil Uji Normalitas Variabel Y
   Kalkulasi 135

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kalianda Menurut Desa/Kelurahan tahun 2011 7
2. Bentuk Partisipasi Menurut Almond 18
3. Kriteria suatu tolak ukur menentukan status sosial ekonomi seseorang mneurut Horton, Hunt, dan Soerjono Soekanto 46
4. Operasionalisasi status sosial ekonomi (X) dan Partisipasi Politik (Y) 47
5. Jumlah Populasi Kelurahan Way Urang 54
6. Jumlah Populasi Kelurahan Bumi Agung 54
7. Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi tertentu dengan Taraf Kesalahan 1%, 5%, dan 10% 55
8. Jumlah Sampel Kelurahan Way dibagi per TPS 58
9. Jumlah sampel Kelurahan Bumi Agung dibagi per TPS 58
10. Hasil Uji Validitas Variabel X Status Sosial Ekonomi 65
11. Hasil Uji Validitas Variabel Y Partisipasi Politik 66
12. Hasil Uji Reabilitas Kelurahan Way Urang 68
13. Hasil Uji Reabilitas Kelurahan Bumi Agung 68
14. Hasil Uji Reabilitas Kalkulasi 68
15. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Way Urang 88
16. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Bumi Agung 91
17. Identitas Responden Menurut Umur Kelurahan Way Urang 93
18. Identitas Responden Menurut Umur Keluruahan Bumi Agung 94
19. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Way Urang 94
20. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Bumi Agung 95
21. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X Status Sosial Ekonomi Indikator Tingkat Pendapatan 97
22. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X

Status Sosial Ekonomi Indikator Jenis Pekerjaan 99
23. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X
Status Sosial Ekonomi Indikator Tingkat Penidikan 102
24. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X
Status Sosial Ekonomi Indikator Ukuran Kekayaan/Aset 104
25. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X
Status Sosial Ekonomi Indikator Ukuran Kekuasaan/Jabatan 107
26. Distribusi Frekuensi Kumulatif Variabel X
Status Sosial Ekonomi 110
27. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Y
Partisipasi Politik Indikator Menjadi Partisipan
dalam Pemungutan Suara 113
28. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Y
Partisipasi Politik Indikator Menjadi Partisipaasi
dalam Diskusi Politik Informal 117
29. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Y
Partisipasi Politik Indikator Menjadi Partisipasi
dalam Rapat Umum 120
30. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Y
Partisipasi Politik Indikator Mengikuti Kampanye
Partai Politik/Calon Kepala Daerah 123
31. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Y Partisipasi Politik
Indikator Keanggotaan Aktif/Pasif Organisasi Politik 126
32. Distribusi Frekuensi Kumulatif Variabel Y Partisipasi Politik..... 128
33. Uji Korelasi Kelurahan Way Urang..... 136
34. Uji Korelasi Kelurahan Bumi Agung 137
35. Uji Korelasi Kalkulasi 138
36. Hasil Uji Regresi Kelurahan Way Urang..... 139
37. Hasil Uji Regresi Kelurahan Bumi Agung 140
38. Hasil Uji Regresi Kalkulasi 141
39. Koefisien Determinasi Indikator Tingkat Pendapatan
Kelurahan Way Urang 143
40. Koefisien Determinasi Indikator Tingkat Pendapatan
Kelurahan Bumi Agung 144
41. Koefisien Determinasi Indikator Tingkat Pendapatan
Kalkulasi 144
42. Koefisien Determinasi Indikator Jenis Pekerjaan
Kelurahan Way Urang 145
43. Koefisien Determinasi Indikator Jenis Pekerjaan
Kelurahan Bumi Agung 145
44. Koefisien Determinasi Indikator Jenis Pekerjaan
Kalkulasi 146
45. Koefisien Determinasi Indikator Tingkat pendidikan
Kelurahan Way Urang 147
46. Koefisien Determinasi Indikator Tingkat Pendidikan
Kelurahan Bumi Agung 147

47. Koefisien Determinasi Indikator Tingkat Pendidikan

Kalkulasi 148
48. Koefisien Determinasi Indikator Ukuran Kekayaan/Aset Kelurahan Way Urang 148
49. Koefisien Determinasi Indikator Ukuran Kekayaan/Aset Kelurahan Bumi Agung 149
50. Koefisien Determinasi Indikator Ukuran Kekayaan/Aset Kalkulasi 149
51. Koefisien Determinasi Indikator Ukuran Kekuasaan/Jabatan Kelurahan Way Urang 150
52. Koefisien Determinasi Indikator Ukuran Kekuasaan/Jabatan Kelurahan Bumi Agung 151
53. Koefisien Determinasi Indikator Ukuran Kekuasaan/Jabatan Kalkulasi 151
54. Keofisien Determinasi Kelurahan Way Urang 152
55. Koefisien Determinasi Kelurahan Bumi Agung 153
56. Koefisien Determinasi Kalkulasi 154
57. Hasil Uji T Kalkulasi 155
58. Hasil Uji F Kalkulasi 157
59. Hasil Persentase Distribusi KumulatifVariabel X Status Sosial Ekonomi Kelurahan Way Urang..... 158
60. Hasil Persentase Distribusi Kumulatif Variabel X Status Sosial EkonomiKelurahan Bumi Agung 159
61. Hasil Persentase Distribusi Kumulatif Variabel Y Partisipasi Politik Kelurahan Way Urang 160
62. Hasil Persentase Distribusi Kumulatif Variabel Y Partisipasi Politik Kelurahan Bumi Agung..... 161

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

> "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Berkenaan dengan amanat normatif tersebut, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan berkualitas, sebab tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai pemilih dalam berbagai tahapan Pemilihan Kepala Daerah, dapat dipastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut kurang berkualitas. Kualitas suatu pemilihan dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih/masyarakat.

Namun partisipasi politik bukan hanya dilihat dari berapa jumlah masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah , tetapi bagaimana antusias masyarakat menghadapi Pemilihan Kepala Daerah. Siapa saja yang aktif mengkuti kegiatan - kegiatan politik, seperti mengikuti diskusi-dikusi mengenai perpolitikan, menjadi anggota partai politik, dan hadir atau ketidakhadirannya.

Seseorang yang mempunyai kesadaran politik yang cukup besar dan memiliki pengetahuan mengenai politik yang cukup luas, dan sadar akan haknya sebagai warga negara maka ia akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, tidak lagi memikirkan status sosial ekonomi yang mereka miliki. Sehingga jika masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik.

Tingginya tingkat partisipasi dalam sebuah kegiatan pemilihan umum juga dapat menunjukkan bahwa, masyarakat memahami masalah-masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik. Sebaliknya rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilu dianggap sebagai ancaman dari demokrasi. Partisipasi yang rendah dapat ditafsirkan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, dan dapat juga diasumsikan rendahnya partisipasi sebagai ketidak percayaan rakyat terhadap hasil pemilu yang akan membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.

Partisipasi politik pada kontestan politik lokal di Provinsi Lampung pun terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah, yaitu : Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Way Kanan. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Kabupten Lampung Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil survey Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa Pembangunan (LAMBANG) yang mencoba meneliti tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, sejak pemilihan umum tahun 2008 sampai dengan pemlihan umum 2015, dari hasil yang didapat bahwa Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 kemarin mengalami penurunan angka partsipasi. Jika pada Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2010 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mampu mencapai 72%, namun pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 kemarin angka partisipasi menurun hingga 65%. (Hasil survey LAMBANG tahun 2015, KPUD Kabupaten Lampung Selatan: 2015).

Berkenaan dengan masalah penuruan angka partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di atas, dari data yang diperoleh peneliti dari hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan, terdapat empat kecamatan yang menarik untuk diadakannya peneleitian pada tingkat partisipasi politik masyarakat, yaitu sebagai berikut :

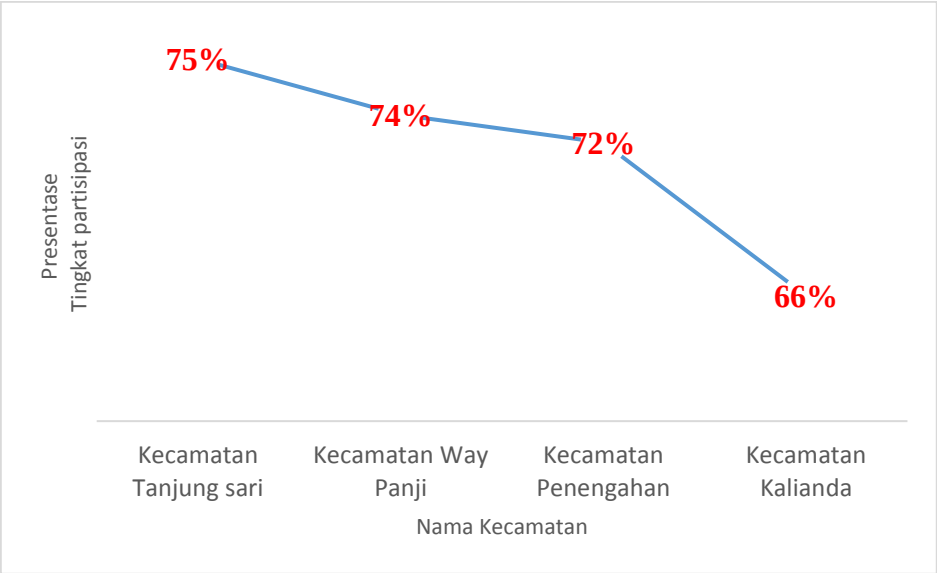

Gambar 1. Tingkat Partisipasi masyarakat di empat kecamatan
(sumber : KPUD Lampung Selatan, diolah peneliti.)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Kalianda yang merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, memiliki angka partisipasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Way Panji, dan Kecamatan Penengahan. Dilihat dari indikator ukuran tingkat pendidikan, ukuran tingkat pendapatan, dan ukuran jenis pekerjaan, Kecamatan Kalianda dapat dikatan sebagai salah satu kecamatan yang masyarakatnya mempunyai status sosial ekonomi menengah ke atas (stratifikasi sosial atas).

Menurut Horton dan Hunt (Soeroso, 2008:13) yang mengungkapkan bahwa kriteria untuk dapat mengukur status sosial seseorang, yaitu : tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan. Pendidikan minimal masyakat Kecamatan Kalianda adalah SMA, jika dilihat dari jenis pekerjaan yang mengacu pada sebuah penghasilan, masyarakat Kecamatan Kalianda banyak yang bekerja sebagai

birokrat, pengusaha, dan pejabat-pejabat pemerintahan (Hasil Wawancara dengan bersama bapak camat Kecamatan Kalianda tanggal 2 Mei 2016, pukul 08.00 WIB).

Selanjutnya, berkenaan dengan masalah di atas, dari data yang diperoleh peniliti mengenai hasil perhitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, ada dua kelurahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini,yaitu : Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, dengan hasil presentase tingkat partisipasi sebagai berikut :

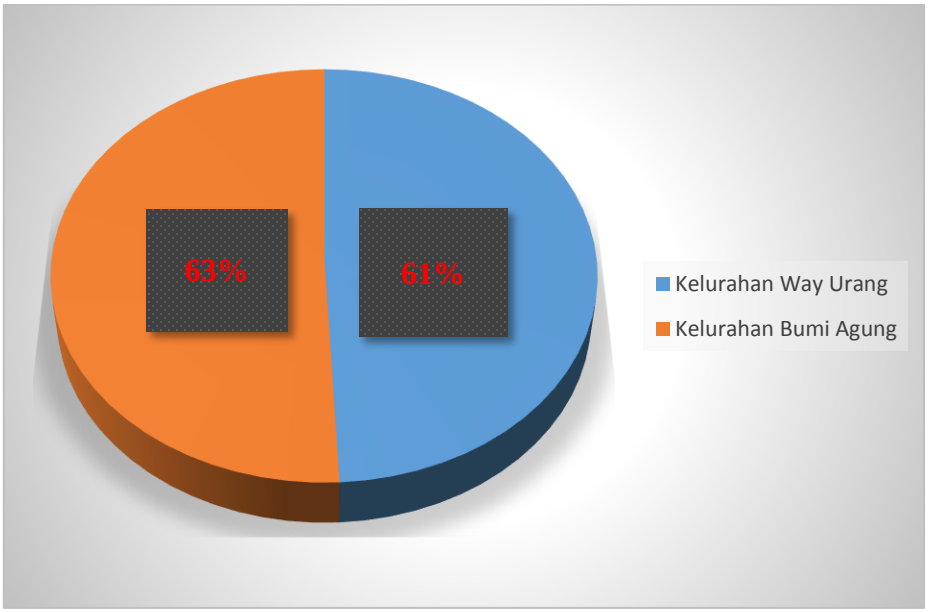

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Kelurahan WayUrang dan
Kelurahan Bumi Agung (sumber : KPUD Lampung Selatan, diolah peneliti)

Berdasarkan gambaran di atas, Kelurahan Way Urang sebagai salah satu kelurahan yang masyarakatnya dapat dikatakan kedalam kelompok masyarakat yang mempunyai status sosial ekonomi menengah ke atas (Hasil wawancara bersama sekretaris lurah Keluarah Way Urang tanggal 2 Mei 2016, pukul 10.00 WIB),

menunjukan angka partisipasi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kelurahan Bumi Agung. yang masyarakatnya dapat dikatakan masuk kedalam kelompok masyarakat yang mempunyai status sosial ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut dilihat dari aspek tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat masing-masing kelurahan tersebut.

Kemudian, bericara mengenai status sosial ekonomi tidak hanya dapat diukur melalui aspek tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaaan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah, Menurut Soerjono Soekanto (Soeroso, 2008:14) mengungkapkan mengenai kriteria tolak ukur suatu status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari aspek ukuran kekayaan seperti kepemilikan atas tempat tinggal dan kendaraan pribadi.

Masyarakat Kelurahan Way Urang dapat dikatakan sebagai kelurahan yang masyarakat digolongkan kedalam kelompok masyarakat kaya, sedangkan masyarakat Kelurahan Bumi Agung dapat dikatan sebagai kelurahan yang masyarakatnya digolongkan kedalam kelompok masayarat miskin (Hasil observasi peneliti, tanggal 1 juni 2016, pukul 09.00 WIB).

Adapun data yang diperoleh peneliti, yang mampu memperkuat argumen peneliti berkenaan dengan ketegori strata sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat Kelurahan Way Urang dan masyarakat Kelurahan Bumi Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kalianda Menurut Desa/Kelurahan tahun 2011

No	Desa Kelurahan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III
1	Kelurahan Way Urang	2.407	531	693	1.034
2	Kelurahan Bumi Agung	928	299	364	119

(Sumber : Kantor Kecamatan Kalianda 2012, diolah peneliti)

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa masyarakat Kelurahan Way Urang jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Bumi Agung lebih dominan jumlah masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat yang sejahtera, dengan demikian sudah pasti dapat dikatakan masyarakat Kelurahan Way Urang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Bumi Agung.

Berdasarkan uraian masalah partisipasi di atas, menurut Surbakti (1999:144) mengungkapkan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu status sosial, status ekonomi, afilisasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi.

Selain itu, sebagaimana diungkapkan dalam penelitiannya oleh Frank Linderfeld (Maran, 2014: 156), menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralineasi dari kehidupan

politik, dan orang yang bersangkutan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiiliki kemapanan ekonomi. Sebaliknya, dalam penelitian Lipset dan Deustch (Budiharjo, 1998:9) dengan kajian perilaku warga negara dalam pemilihan umum ditemukan suatu pola bahwa pendapatan, pendidikan, dan status sosial merupakan faktor penting dalam proses partisipasi.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti teliti ini. Berikut penelitian terdahulu yang telah penulis sajikan dalam bentuk narasi :

1. Arif Mahsyar mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, program sarjana pada tahun 2012. Dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Intensitas Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 (studi pada Kelurahan Yosorejo Kota Metro)". Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensitas partisipasi politik dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula intensitas partisipasi politik yang terjadi, begitupun sebaliknya pengaruh suatu tingkat pendidikan terhadap intensitas partisipasi politik masuk kedalam kategori tinggi atau kuat berdasarkan hasil perhitungan SPSS menggunakan rumus *spearman* dengan nilai r sebesar 0,873.

2. Novita Polina Sitompul seorang mahasiswi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), program sarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007 dengan judul "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (studi: Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara). Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dari status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Hutauruk ini. Pengaruh itu lebih kepada kualitas partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam berpolitik, status sosial ekonomi akan mengkotakkan masyarakat kedalam niat/motivasi apa yang menimbulkan masyarakat untuk berpolitik.

Namun, jika kedua penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap itensitas partisipasi politik masyarakat dan pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dan didapatkan hasil penelitian bahwasanya adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap itensitas partisipasi politik masyarakat dan adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat, maka peneliti ingin meneliti perihal apakah status sosial ekonomi berpangaruh terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015 dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, berdasarkan *setting* teori dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti " Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015. (Studi perbandingan pada Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "apakah adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015 di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015 di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Sebagai bahan acuan atau refrensi bagi para peneliti-peneliti yang lain yang ingin mengembangkan ilmu sosial dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan sejenisnya atau yang bersangkutan.

2. Secara Praktis

   Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian ini memberikan sebuah gamabaran mengenai sebuah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya dan masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung pada khususnya yaitu status sosial ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sebuah input bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai sebuah referensi untuk merumuskan kebijakan dalam hal manajemen Pemilihan Kepala Daerah.

   Selain itu, komisi pemilihan umum dan partai politik sebagai sebuah lemabaga yang bertanggung jawab mengenai pendidikan politik bagi masyarakat, diharapkan mampu memaksimalkan tugasnya agar lebih maksimal dalam memberi pemahan mengenai makna dan fungsi dari sebuah kegiatan politik.

Sehingga, masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengikuti segala macam rangkain kegiatan pemilihan umum, baik di tingkat nasional ataupun lokal tanpa berlandaskan stara sosial/tingkatan status sosial ekonomi yang mereka miliki. Dengan kata lain masyarakat berpartisipasi berdasarkan kesadaran mereka, dengan bermodalkan pemahan mereka tentang perpolitikan, bukan karna faktor kepentingan ataupun keuntungan dan kerugian yang akan mereka peroleh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Dalam negara demokrasi, partisipasi politik berperan penting dalam jalannya sebuah roda pemerintahan yang demokratis. Menurut (Maran 2014:147) partisipasi politik adalah sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tangung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara .

Menurut Budihardjo (Budiyanto, 2007:20) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Sedangkan menurut (Rahman, 2007:285) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi dapat terlihat ketika warga negara ikut terlibat dalam pemilihan umum baik menggunakan hak pilih maupun kegiatan lain yang menyangkut kegiatan pemilu.

Selanjutnya diungkapkan oleh Mc Closky dalam *International Encyclopedia of the Social Siences* (Budihardjo, 2008:367) "partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat secara sukarela mengambil bagian dari proses pemilihan pemimpin langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum."(*The term political participation will refer those voluntary activities by wich members of a society share in the selection of rules and directly, in the formation of public policy*).

Menurut (Maran, 2001:147) bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Hal ini dipertegas dengan pendapat dari Rush (2007:121) bahwa dalam partisipasi politik dapat ditinjau sampai sejauh mana dan sampai tingkat apa individu terlibat dalam sistem politik. Partisipasi politik dapat ditinjau dari empat sudut pandang yaitu bentuk partisipasi politik, luas partisipasi politik, orang yang berpartisipasi serta alasan orang-orang berpartisipasi politik.

Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Dapat kita lihat dari pengertian demokrasi tersebut secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga .

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik di atas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Selanjutnya secara eksplisit, diungkapkan Huntington dan Nelson (Sastroatmodjo, 1994:16) membedakan partisipasi politik kedalam dua karakter, yaitu:

a. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela;
b. Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.

Kemudian Menurut (Surbakti, 1992:141) juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik di atas yakni:

> "Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pimpinan pemerintahan" Partisipasi politik tersebut didefenisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa"

Berangkat dari gagasan-gagasan menganai partisipasi politik di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat secara sukarela untuk dapat ikut serta secara langsung dalam seluruh model dan jenis kegiatan politik/ Kegiatan tersebut dilakukan agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan suatu kebijakan ataupun untuk menentukan pemimpin yang dinilai pantas dan berkompeten, yaitu dengan cara memilih pada suatu kegiatan pemilihan umum.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang dapat terlihat melalui indikator keikut sertaannya memilih pada kegiatan pemilihan baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Namun, kegiatan pemberian suara ini dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling kecil, karena hal tersebut menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Menurut Maran (2001:148) bentuk partisipasi politik yang

paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Michael Rush dan Philiph Althoff (Maran, 2014:148) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

a) Menduduki jabatan politik atau administratif
b) Mencari jabatan politik atau administratif.
c) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
d) Menjadi anggota pasif dalam suatu kompensasi politik.
e) Menjadi anggota aktif atau pasif dalam suatu organisasi semi politik.
f) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan lain-lain.
g) Partisipasi dalam diskusi politik informal, dan
h) Partisipasi dalam pemilihin suara (voting).

Sedangkan bentuk partisipasi politik masyarakat menurut (Budiharjo, 2008:10) partisipasi politik aktif dan pasif, bentuk yang paling sederhana dari partisipasi politik aktif adalah ikut memberikan suara dalam pemilihan umum, turut serta dalam demonstrasi, dan memberikan dukungan keuangan dengan cara memberikan sumbangan. Sedangkan bentuk partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi yang sebentar- sebentar. Misalnya, diskusi politik informal dengan individu- individu dalam keluarga masing- masing, dengan rekan kerja, atau dengan sahabat.

Adapun rincian dari pandangan Almond (Damsar, 2010:186) tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Bentuk Partisipasi menurut Almond

Kovensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelomok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik harta benda(pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) 7. Perang grilya dan revolusi

(sumber : Almond dalam Damsar, 2010:186)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Berdasarkan beberapa pemaparan menganai bentuk-bentuk partisipasi di atas, Partisipasi politik yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dapat berupa kegiatan memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, di antaranya menjadi partisipan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, ikut kampanye, serta menjadi anggota pasif suatu organisasi politik. Hal tersebut di dasarkan kepada asumsi peneliti bahwa untuk dapat melihat tingkat

partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dan ukur menggunakan indikator-indikator tersbut.

3. Fungsi Partisipasi Politik

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi antara lain, menurut Lane (Efriza 2012:188) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu:

a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
c) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
d) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dalam persektif berbeda, Sanit (1995:18) memandang tiga fungsi partisipasi politik sebagai berikut:

a). Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik.
b). Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
c). Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.

Berangkat dari dua gagasan mengenai fungsi partisipasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya, fungsi partisipasi politik adalah suatu bentuk usaha seseorang untuk apat mengejar kebutuhan ekonomi mereka, atau juga dapat dikatakan sebagai usaha seseorang agar dapat mendukung calon penguasa yang maju dalam sebuah kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya fungsi partisipasi berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam hal memberikan suatu dukungan ataupun evaluasi berupa kritikan terhadap kinerja pemerintah dan untuk memenuhi kebutuhan politik setiap individu.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat

Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut (Huntington, 1992:16-18) antar alain :

a. Faktor Sosial ekonomi, status sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan.
b. Faktor Politik, yang meliputi:

    1. Komunikasi Politik, komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik,
    2. Kesadaran Politik, kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarkat dan politik,
    3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

4. Kontrol masyrakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu,
5. Faktor fisik individu dan lingkungan faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antar berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya,
6. Faktor Nilai Budaya, nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik ketika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik. Kebijakan, implementasi dan evaluasi dampaknya. Kebijakan adalah bagian keputusan politik yakni program prilaku untuk mencapai tujuan pemerintah-masyarakat.

5. Faktor penyebab seseorang tidak ikut berpartisipasi politik

Morris Rosenberg (Maran 2014:156) mengemukakan tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpatisipasi dalam kehidupan politik, yaitu :

a. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Disini peneliti beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya.

b. Karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan dia merasa sia-sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik.
c. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Disini orang, misalnya tidak menghargai gagasan-gagasan politik. Tidak ada hasil yang bisa dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Berbicara mengenai sebuah partisipasi maka presepsi masyarakat yang paling sederhana adalah hadir dan menggunakan hak pilihnya, atau bahkan tidak hadir serta tidak menggunakan hak pilihnya. Senada dengan hal tersebut, ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Wolfinger (Efriza, 2012: 543), yaitu:

1. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan :

> *"in high school and college, we learn the political system and about how the issue affect our lives, are exposed to peer pressure to participate in the political process, and an acquire a sense of efficacy, of control over our fate. All these influences predispose us to vote. The poorly educated, by contrast, are predisposed to avoid politics because of their lack of interest in the political process, their unawareness of its relevance to their lives,and their lack of the skills necessary to deal with the bureaucratic aspects of voting and registration."* (di sekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai sistem politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi dalam

> proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara. Yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar).

2. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,

3. Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berlatarbelakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah”.

6. Faktor pendorong seseorang ikut berpartisipasi politik

Sementara itu Frank Lindenfeld (Maran, 2014:156) menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. dalam studinya Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun

akan menjadi apatis. hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi.

Milbrath (Maran 2014:156-157) menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu sebagai berikut :

a. Karena adanya perangsang minat ini dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik.
b. Karena faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
c. Faktor karakter sosial, hal ini menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang.
d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

B. Tinjauan Tentang Status Sosial ekonomi

1. Pengertian Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi adalah ukuran gabungan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap orang lain, berdasarkan dari pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika menganalisis status sosial ekonomi sebuah keluarga, pendidikan dan pekerjaan ibu dan ayah

diperiksa, serta pendapatan dikombinasikan, dan dibandingkan dengan individu yang lainnya, ketika atribut mereka sendiri dinilai (GOP: 2008).

Sedangkan menurut FS Chapin (Kaare, 1998:26) mengungkapkan status sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata umum yang berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, kepemilikan barang, dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa status sosial ekonomi adalah tinggi atau rendahnya presentase yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu lapisan masyarakat, berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga dalam masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan.

Menurut (Sudijono, 1995:67) status ekonomi sosial adalah kedudukan seorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh pemilikan kekayaan. Pemilikan kekayaan di dalam masyarakat sebagai dasar di dalam menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi individu dalam masyarakat. Status sosial ekonomi seseorang tidak dapat dipilah-pilah, melainkan dikarenakan dipaksakan oleh keadaan untuk dapat diterima, tak peduli kemudian hari seseorang senang atau tidak senang yang harus menerima kedudukan orang tuanya, seperti seorang petani atau buruh.

Sedangkan menurut Hendro Puspito (1989:333) setiap orang menyandang nasib yang sama yakni bahwa ia tidak dapat memilih kualitas biologis dan sosiologis kedua orang tuanya sesuai dengan keinginannya. Sama halnya dengan kenyataan bahwa ia tidak dimintai persetujuanya apakah mau dilahirkan atau tidak. Baru kemudian setelah ia besar dan dapat menilai situasi dan kondisinya sendiri dan keluarganya, ia dapat menggunakan kebebasan yang ada padanya untuk menerima atau menolak nasib itu. Kalau ia tidak mau menerima kedudukan sosial yang diwariskan dan mau mencari kedudukan yang lebih tinggi, maka ia harus memperhitungkan dua hal, yaitu bakat dan kemampuannya sendiri dan jalan yang sesuai dengan bakatnya untuk di tempuh melewati jenjang-jenjang sosial (vertikal) menuju pada strata kedudukan sosial yang lebih.

Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi kebawah biasanya apatis terhadap kegiatan politik misalnya pemilu, alasanya adalah mereka menganggap politik tidak begitu berperan dalam menggerakkan penghasilanya. Sehingga wajar jika kecurangan seperti *money politic* masih terjadi, hal itu dipilih karena masyarakat yang dikategorikan kedalam kelas bawah khusunya akan lebih terpancing untuk mengikuti pemilu (digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/index/assoc/HASH0152/…/doc.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2011).

Berdasrkan gagasan yang diungkangpan menurut (GOP, 2008) status sosial ekonomi adalah ukuran gabungan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap orang lain, berdasarkan dari pendapatan,

pendidikan, dan pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwasanya indikator yang mampu mengukur status sosial ekonomi pada penelitian ini adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pekerjaan.

2. Landasan Teori (*Stratification)*

Dalam masyarakat terdapat sistem lapisan kelompok-kelompok yang dalam sosiologi dikenal dengan istillah stratifikasi sosial *(social stratification*). Menurut Soerjono Soekanto (Soeroso, 2008:11), menyatakan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi, dalam artian kita tidak akan menemukan masyarakat seperti kue lapis, tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dibedakan secara vertikal menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah berdasarkan kriteria tertentu.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (Soeroso, 2008:11) menyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan sistem peringkat status dalam masyarakat. Peringkat yang memberitahukan kepada kita adanya dimensi vertikal dalam status sosial yang ada dalam masyarakat. Beberapa ahli mengmukakan mengenai kriteria berkaitan dengan dimensi vertikal, antara lain :

1. Paul B Horton dan Chestler L. Hunt (Soeroso, 2008:11), mengatakan bahwa dua ribu tahun yang lalu Aristoteles mengemukakan bahwa penduduk dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu :

a. Golongan Sangat Miskin
b. Golongan Miskin
c. Golongan Yang Berada diantara Mereka

2. Menurut Karl Marx (Soeroso, 2008:11) mengungkapkan bahwa kelas sosial utama terdiri atas :

   a. Golongan Ploretariat
   b. Golongan Kapitaslis (borjuis), dan
   c. Golongan menengah (borjuis rendah)

Berdasarkan gagasan menurut Aristoteles dan Karl Marx di atas maka, dapat kita lihat hal tersebut merupakan salah satu bukti adanya stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat yang sederhana sekalipun. Pendapat Aristoteles dan Karl Marx tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa stratifikasi sosial sebagai gejala yang universal. Kriteria jenis kekayaan dan juga jenis profesi pekerjaan merupakan sebuah kriteria yang sederhana, sekaligus menyatakan bahwasanya di dalam masyarakat kita tidak akan menemukan masyarakat tanpa kelas. Senada dengan hal tersebut, beberapa ahli menjelaskan alasan mengapa terjadi *social stratification* dalam perkembangan masyarakat menuju masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Pendapat-pendapat terasebut dikemukakan oleh, antara lain :

1. Menurut Horton dan Hunt

   Horton dan Hunt (Soeroso, 2008:12) mengungkapkan alasan terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan sesuatu yang dihargai

dalam masyarakat jumlahnya terbatas dan mengakibatkan penyebarannya tidak merata. Seseorang yang menduduki kelas atas dikarenakan memperoleh sesuatu yang berharga tersebut. Sedangkan bagi yang tidak memperolehnya maka, secara otomatis akan menduduki kelas bawah yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sesuatu yang berharga menurut Horton dan Hunt adalah sebagai berikut :

a. Kekayaan dan Penghasilan

   Kekayaan dan penghasilan merupakan dua variabel yang mempunyai keterkaitan yang erat. Apabila seseorang memiliki penghasilan yang banyak secara tidak langsung kekayaannya pun akan meningkat. Kekayaan dan penghasilan menjadi salah satu ukuran bagi stratifikasi sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang tergolong kaya secara tidak langsung akan mampu menduduki kelas atas di dalam masyarakat, sebaliknya seseorang yang tergolong miskin akan menduduki kelas bawah.

b. Pekerjaan

   Selama ini pekrejaan menjadi sarana dalam menghasilkan pendapatan, namun disamping itu pekejaan pun mampu menunjukan suatu status yang di dalamnya mengandung penghargaan. Seperti yang diungkap oleh Karl Marx yang membedakan kelas borjuis sebagai orang yang memiliki modal yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan (pengusaha) atau kapital

dan proletariat sebagai orang yang hanya memiliki tenaga untuk bekerja (buruh).

c. Pendidikan

Pendidikan dibedakan menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penjenjangan tersebut merupakan suatu bukti bahwa pendidikan adalah dimensi yang vertikal dari sebuah konsep stratifikasi sosial. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang mampu memberikan seseorang sebuah penghargaan di dalam masyarakat. Seperti contoh seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi (S1) dan mendapatakan sebuah gelar sesuai dengan keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti contoh seseorang yang mencantumkan gelar S.E di belakang namanya dengan presepsi bahwa orang tersebut mempunyai keahlian dibidang ekonomi, maka secara tidak langsung masyarakat yang sudah mampu mencantumkan sebuah gelar di belakang nama meraka akan memiliki jenjang stratifikasi sosial atas. Sebaliknya, masyarakat yang hanya mampu menempuh pendidikan hanya sampai tahap pendidikan menengah (SMP dan SMA), tahap SD, atau bahkan tidak tamat SD, mereka akan memiliki jenjang stratifikasi bawah.

2. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, selama di dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu tersebut akan menjadi bibit yang menimbulkan lahirnya sebuah sistem yang berlapis-lapis yang ada di dalam masyarakat tersebut. Adapun menurut soerjono soekanto kriteria yang menjadikan masyarakat berlapis-lapis adalah sebagai berikut :

a. Ukuran Kekayaan

Ukuran menyatakan sebuah kuantitas terhadap suatu hal. Jika ukuran kekayaan, maka dapat dikatakan adanya suatu jumlah tertentu mengenai kekayaan yang dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur. Ukuran kekayaan yang tinggi atau banyak, ukuran sedang atau cukup, ukuran sedikit atau miskin. Meskipun ukuran kekayaan menyatakan sebuah kuantitas, akan tetapi kekayaan adalah suatu hal yang relatif untuk dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam menentukan stratifikasi sosial. Sama halnya dengan presepsi masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam melihat ukuran kekayaan. Jika masyarakat pedesaan melihat ukuran kekayaan dari aspek luas kepemilikan dan pengusaan tanah, akan tetapi di dalam masyarakat perkotaan untuk dapat mengukur suatu kekayaan dilihat dari kepemilikan rumah mewah atau mobil mewah. Sehingga dapat disimpulkan meskipun ukuran kekayaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari sebuah stratifikasi sosial, akan

tetapi hal tersebut tetap tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

b. Ukuran Kekuasaan

Stratifikasi sosial yang dapat diukur dalam hal ini adalah jabatan yang dimiliki seseorang, baik itu jabatan di dalam organisai atau lembaga maupun jabatan di dalam sebuah masyarakat. Ukuran kekuasan akan terkait dengan besar kecil dan luas sempitnya pengaruh yang dimilikinya di dalam masyarakat. Semakin luas dan tinggi pengaruh yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin semakin tinggi stratifikasi yang dimilikinya.

c. Ukuran Kehormatan

Kehormatan yang diperoleh bukanlah dari dirinya, melainkan penilaian yang datang dari orang lain. Dengan demikian penghormatan berniali obyektif bukan subyektif. Ukuran kehormatan lebih kepada kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, seperti jujur, berani karena benar, rendah hati, dan ketaqwaan.

d. Ukuran Ilmu Pengetahuan

Terdapat dua jenis tolak ukur dalam menentukan strara sosial seseorang dilihat dari aspek ukuran ilmu pengetahuan, yaitu :

Pertama, ukuran formal di mana ijazah sebagai ukurannya. Semakin tinggi gelar atau ijazah yang dimiliki seseorang, makan akan semakin tinggi strata sosial yang dimiliknya. *Kedua,* ukuran non-

formal di mana keahlian yang mereka miliki melalui keterampilan yang akan dilakukannya. Sebuah keahlian yang diperoleh tidak melaui jalur pendidikan formal. Seperti contohnya pakar pengobatan alternatif.

Dengan demikian, konsep yang digunakan dalam penelitian ini agar mampu mengatahui status sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dengan menggunakan konsep Horton dan Soerjono Seokanto yaitu : tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, ukuran kekayaan/aset, ukuran kekuasaan/jabatan. Asumsi peneliti memilih menggunakan konsep tersebut adalah penliti mempunyai keyakinan yang cukp bahwa dengan menggunakan indikator-indikator tersebut peneliti dapat mengatahui keadaan/status sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Penegrtian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari daerah mereka. Mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyrakat setempat dapat terpenuhi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing.

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan bukan hanya memilih penguasa daerah tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdi untuk kepentingan sebuah rakyatnya. Pola pikir lama yang lebih menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kristiadi 2008:115).

Menurut Cangara (2011:210) dalam Pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah harus dilakukan pemilihan langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.

Esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui suatu pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah

merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan.

Berangkat dari beberapa gagasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pemilhan umum, namun perbedaannya adalah pemilihan umum merupakan suatu kegiatan pemilihan yang bersifat domestik, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah bersifat regional. Pemilihan Kepala Daerah dapat dijadikan suatu sarana bagi masyarakat untuk dapat menyeleksi calon-calon yang akan duduk sebagai penguasa, sehingga harapan masyarakat dapat terwujud, yaitu terpilihnya seorang penguasa yang diharapkan dan berkompeten. Adapun penjelasan mengenai dasar-dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Sejak bulan juni tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, akan di pilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dalam pelaksanaannya secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 dan pasal

119 yang kemudian beberapa pasal tersebut mengalami perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Pemeruntah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilhan kepala daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diamanatkan pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berpedoman kepada asas:

a) Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b) Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin

berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

c) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d) Rahasia

Pemilih dijamin ketika memberikan suaranya, bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e) Jujur

Penyelenggaraan atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f) Adil

Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun (Pramusinto, 2009: 89)

D. Kerangka Pikir

Partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah komponen penting dalam suatu kegiatan pemilihan umum, salah satunya adalah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah. Namun, sering kali terjadi adanya suatu penurunan angka partisipasi politik masyarakat pada sebuah kegiatan pemilihan umum. Salah faktor yang diperkirakan mejadi penyebab turunnya angka partisipasi politik masyarakat adalah status sosial ekonomi keluarga. Secara teoritis, yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. Secara sederhana dapat terlihat bahwa masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi lebih aktif dalam berpartisipasi politik dalam. Sebaliknya masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah cenderung lebih apatis terhadap kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan pemilu pada umumunya. Indikator yang digunakan pada penelitian

ini agar mampu mengukur status sosial ekonomi seseorang termasuk dalam kelompok status sosial ekonomi menengah ke atas atau masuk kedalam kelompok status sosial ekonomi menengah kebawah adalah indikator-indikator yang ada dalam konsep status sosial ekonomi hotron dan soerjono seokanto. Adapun indikator-indokator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan seperti kita dapat melihat dari jumlah pendapatan dan pengeluaran rumah tangga suatu keluarga dalam jangka waktu satu bulan.
2. Jenis pekerjaan apakah yang ditekuni setiap harinya oleh seseorang.
3. Tingkat pendidikan pendidikan apakah yang terakhir ditempuh seseorang.
4. Ukuran kekayaan/aset seseorang yang dapat dilihat dari aspek kepemilikan atas kendaraan pribadi dan bentuk tempat tinggal yang dimilikinya.
5. Ukuran kekuasaan/jabatan yang di miliki seseorang baik di tempat kerja ataupun di dalam masyarakat.

Sedangkan indakator yang digunakan pada penelitian ini guna dapat mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat adalah konsep bentuk partisipasi menurut Rush dan Altof menjadi partisipan dalam pemungutan suara, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, mengikuti kampanye partai politik/calon kepala daerah, kenaggotaan aktif suatu organisai politik, dan keanggotaan pasif suatu orgnisasi politik. sehingga, dari pemeparan teoritis di atas kerangka pemikirin pada penilitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

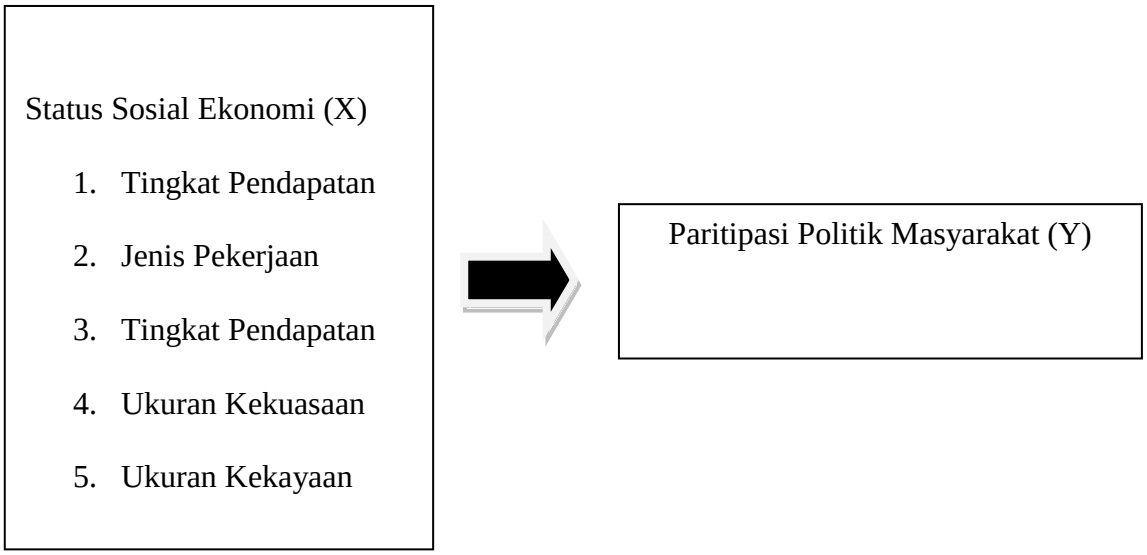

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan tinjauan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho : status sosial ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

Ha : status sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua variabel sehingga menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori, yang artinya penelitian yang menggunakan data yang sama dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian eksplanatori tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan gejala sosial lainnya, dan mengapa hubungannya seperti itu.

Menurut (Mardalis, 2004:26 menungkapkan penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesis yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

Pendapat lain (Prasetyo, 2005:43) juga menjelaskan bahwa metode eksplanatif dirancang untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, kemudian data yang diperoleh diolah dan disusun sampai diperoleh kejelasan

tentang hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan utama dalam penggunaan metode ini adalah untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpukan bahwa metode penelitian eksplanatif adalah sebuah metode penelitian yang mencari hubungan sebab akibat yang menggunakan variabel bebas dengan variabel terikat.

Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian eksplanatif, dimana hubungan sebab yakni status sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan akan menibulkan akibat pada partisipasi politik masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatory dikarenakan peneliti ingin mencari hubungan sebab status sosial ekonomi yang akan memberikat sebuah akibat kepada partisipasi politik masyarakat baik di Kelurahan Way Urang maupun Kelurahan Bumi Agung.

B. Variabel

Menurut Fathoni (2006:114) variabel adalah konsep-konsep yang mengandung lebih dari satu nilai, besaran atau atribut. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*Independen)* adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain

(disimbolkan sebagai X), sedangkan variabel terikat (*Dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain (disimbolkan sebagai Y). Jadi variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi (X) dan partisipasi politik masyarakat (Y).

Adapun variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Independen* (variabel X)

   Variabel *Independen*t adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah status sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Way urang dan Kelurahan Bumi Agung, ynag dilihat dari indaktor, yaitu :

   a. Tingkat pendidikan,
   b. Tingkat pendapatan,
   c. Jenis pekerjaaan,
   d. Ukuran kekayaan,
   e. Ukuran kekuasaan.

2. Variabel *Dependen* (variabel Y)

   Variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen juga dapat dipahami sebagai akibat dari manipulasi variabel independen. Variabel dependen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat, yaitu :

a. Menjadi partisipan dalam Pemilihan umum,
b. Partisipasi dalam diskusi politik informal,
c. Partisipasi dalam rapat umum,
d. Ikut kampanye,
e. Menjadi anggota aktif/pasif suatu organisasi politik,

C. Definisi Konseptual

Menurut Azwar (1999:76) konseptualisasi merupakan proses pemberian definisi teoritis atau definisi konseptual pada sebuah konsep. Definisi konseptual merupakan suatu definisi dalam bentuk yang abstrak yang mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain yang bisa saja abstrak untuk menjelaskan konsep pertama tersebut. Konseptualisasi dapat juga dikatakan sebagai proses yang digunakan untuk menunjukkan secara tepat tentang apa yang kita maksudkan bila kita menggunakan suatu istilah tertentu. Mengenai konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi Politik

   Menurut (Maran 2014:147) partisipasi politik adalah sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk serta jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tangungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Partisipasi politik yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dapat berupa kegiatan memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, di antaranya menjadi partisipan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, ikut kampanye, serta menjadi anggota aktif dan pasif suatu organisasi politik.

Adapun indikator yang menjadi tolak ukur peneliti untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarkat adalah sebagai berikut :

a. Menjadi partisipan dalam pemilihan umum,
b. Partisipasi dalam diskusi politik informal,
c. Partisipasi dalam rapat umum,
d. Ikut kampanye,
e. Menjadi anggota pasif suatu organisasi politik, dan
f. Serta menjadi anggota aktif suatu organisasi politik.

2. Status Sosial Ekonomi

Menurut (GOP: 2008) status sosial ekonomi adalah ukuran gabungan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap orang lain, berdasarkan dari pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika menganalisis status sosial ekonomi sebuah keluarga, pendidikan dan pekerjaan ibu dan ayah diperiksa, serta pendapatan dikombinasikan, dibandingkan dengan individu, ketika atribut mereka sendiri dinilai.

Menurut Sudijono (1995:67) status ekonomi sosial adalah kedudukan seorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh pemilikan kekayaan. Pemilikan kekayaan di dalam masyarakat sebagai dasar di dalam menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi individu dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa konsep status sosial ekonomi di atas, dengan demikian kriteria untuk menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria suatu tolak ukur menentukan status sosial ekonomi seseorang mneurut Horton, Hunt, dan Soerjono Soekanto (Soerosoe, 2008:12)

Horton dan Hunt	Soerjono Soekanto
Kekayaan dan penghasilan Pekerjaan Pendidikan	Ukuran kekayaan Ukuran kekuasaan Ukuran kehormatan Ukuran Ilmu Pengetahuan

(sumber : Soerosoe, 2008:12)

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini guna dapat mengukur status sosial ekonomi seseorang adalah :

1. Tingkat pendapatan
2. Jenis pekerjaan
3. Tingkat pendidikan
4. Ukuran kekayaan/aset
5. Ukuran kekuasaan/jabatan

D. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (2008:46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi oprasional merupakan oprasionalisasi dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan untuk mengaplikasikanya dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggemukakan terkait masalah apakah adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Operasionalisasi status sosial ekonomi (variabel X) dan partisipasi politik (variabel Y).

Variabel	Indokator	Sub Indkator
Status Sosial Ekonomi (X)	Tingkat pendapatan	Jumlah pendapatan rumah tangga perbulannya
		Jumlah Pengeluaran rumah tangga perbulan
	Jenis pekerjaan	Jenis pekerjaan yang ditekuni seseorang, guna mendapatkan penghasilan
	Tingkat pendidikan	Pendidikan yang terakhir yang ditempuh seseorang
	Ukuran kekayaan/aset	Kepemilikan atas kendaraan pribadi
		Bentuk rumah yang dimiliki
	Ukuran kekuasaan/jabatan	Jabatan yang dimiliki seseorang di dalam tempat kerja
		Jabatan yang dimiliki seseorang di dalam masyarakat

Partisipasi Politik Masyarakat (Y)	Menjadi partisipan dalam pemungutan suara	Keterlibatan menjadi panitia penyelenggara baik sebagai panitia pemilihan, saksi atau relawan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015
		Menggunakan hak pilih untuk mencoblos pada saat Pemilihan Kepala Daerah digelar.
	Partisipasi dalam diskusi politik informal	Ketertarikan dalam dialog bersama keluarga atau teman mengenai Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015
		Intensitas berdialog bersama keluarga atau teman mengenai isu-isu politik.
	Partisipasi dalam rapat umum	Keterlibatan dalam pertemuan atau kampanye baik sebagai tim sukses yang diadakan partai politik/calon kepala daerah.
		Keterlibatan dalam pertemuan atau kampanye baik sebagai peserta yang diadakan partai politik/calon kepala daerah
	Mengikuti kampanye partai politik/calon kepala daerah	Keterlibatan menjadi panitia kampanye partai politik atau calon kepala daerah.
		Keterlibatan menjadi peserta kampanye partai politik atau calon kepala daerah

	Keanggotaan aktif suatu organisasi politik	Keterlibatan menjadi anggota suatu partai politik.
	Keanggotaan pasif suatu organisasi politik	

Berdasarkan operasionalisasi dari variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik di atas, maka di dalam kuisioner penelitian terdapat delapan belas (18) pertanyaan, dengan jumlah pertanyaan pada variabel status sosial ekonomi sebanyak 8 pertanyaan yang terbagi dalam lima indikator, dan jumlah pertanyaan pada variabel partisipasi politik sebanyak sepuluh (10) pertanyaan yang terbagi ke dalam lima indikator penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang telah digunakan peneliti untuk dapat mengukur status sosial ekonomi dan partisipasi politik masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung. Sehingga dengan demikian selanjutnya akan dilakukakn uji statistik menggukan bantuan program *SPSS* guna dapat mengetahui bersarnya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurah Bumi Agung dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan penelitian ini di tiga TPS dengan kategori partisipasi politik tertinggi jika dibandingkan dengan TPS lainnya yang ada di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung adalah selama 25 hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 25 September 2016.

Kemudian menurut Singarimbun dan Effendi (2000:169) mengungkapkan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* adalah lokasi penelitian di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:285) cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Dengan demikian peniliti telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Alasan peneliti memilih Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, karena kelurahan tersebut masyarakatnya dapat dikatakan masuk kedalam kelompok masyarakat yang mempunyai kemapanan ekonomi menengah keatas dan Kelurahan Bumi Agung dapat dikatakan masuk kedalam kelompok masyarakat yang mempunyai kemapanan ekonomi menengah kebawah.Selain itu peneliti juga mempertimbangkan teori substantif yang digunakan oleh peneliti.

F. Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data ini adalah responden yang diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kemudian dilakukan wawancara medala untuk memperoleh informasi tambahan

berkaitan dengan penelitian ini dan mempertanyakan lebih dalam mengenai alasan yang diberikan responden di dalam pertanyaan terbuka pada variabel partisipasi politik. Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang akurat, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian, baik dari hasil kuesioner maupun wawancara mendalam kepada responden.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang ada di instansi tersebut. Data sekunder yang diperoleh berupa gambaran umum wilayah, sejarah berdirinya wilayah terkait, keadaan status sosial ekonomi masyarakat wilayah terkait, sejarah partisipasi wilayah terkait, keadaan sosial ekonomi menurut jenis pekerjaan, dan topografi wilayah terakit.

G. Sumber Data Penelitian

Sumber data atau informasi adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebegai berikut:

1. Kuisioner

   Kuisioner dalam penelitan ini merupakan angket sekaligus alat yang digunakan peneliti untuk medapatkan informasi yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang terbgai atas masing-masing variabel yaitu status sosial ekonomi (X) dan partisipasi politik (Y). Kemudian kuisioner tersebut di sebar kepada responden yang terpilih yang ada di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung. Responden tersebut dipilih secara *proportional area random sampling*.

2. Wawancara

   Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam mengenai alasan yang diberikan oleh responden di dalam pertanyaan terbuka yang terdapat dalam pertanyaan pada variabel partisipasi politik. Selain itu, peneliti mengklarifikasi jawaban responden tersebut kepada pihak yang menurut peneliti sangat mempuni untuk meberikan informasi terkait masalah partisipasi politik masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung seperti Lurah pada masing-masing kelurahan.

3. Dokumen

   Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, Jurnal, data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, hasil wawancara terhadap Lurah kelurahan terkait mengenai gambaran status sosial ekonomi yang ada di dalam kelompok masyarakat kelurahan terkait, serta rekapitulasi hasil penghitungan

suara di Kelurahan Way urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

H. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Prasetyo (2005:119) mengungkapkan populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian, bila jumlah populasi dibawah seratus maka populasi tersebut dijadikan sampel oleh peneliti, sebaliknya jika di atas seratus maka digunakan perumusan dalam penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daearah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Selatan, populasi Kelurahan Way Urang berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu berjumlah 10.499 orang, yang tersebar pada dua puluh dua TPS, Sedangkan populasi Kelurahan Bumi Agung berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu berjumlah 3.455 orang, yang tersebar di tujuh TPS. Dengan demikian, maka jumlah populasi dalam peneilitian ini berjumlah

13.954 orang. Namun dengan pertimbangan mengingat waktu, jarak tempuh antar TPS, dan lain sebagiannya yang dimiliki peneliti, maka populasi yang di ambil dalam penelitian ini hanya populasi yang yang ada pada tiga TPS untuk masing-masing kelurahan dengan angka partisipasi tertinggi. Adapun hasil akhir jumlah populias dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Populasi Kelurahan Way Urang

No	TPS	Jumlah DPT	Angka Partisipasi
1	7	443	69%
2	13	392	74%
3	14	364	69%
Jumlah		1.199	

(sumber : KPUD Lampung Selatan, diolah peneliti)

Berdasrkan uraian tabel di atas, maka populasi untuk Kelurahan Way Urang dari tiga TPS dengan angka partisipasi tertinggi dibandingkan dengan TPS lainnya yang ada di kelurahan ini berjumlah 1.199 orang.

Tabel 6.Jumlah Populasi Kelurahan Bumi Agung

No	TPS	Jumlah DPT	Angka Partisipasi
1	2	372	70%
2	4	738	66%
3	7	181	70%
Jumlah DPT		1.291	

(sumber : KPUD Lampung Selatan, diolah peneliti)

Berdasrkan uraian tabel di atas, maka populasi untuk Kelurahan Bumi Agung dari tiga TPS dengan angka partisipasi tertinggi dibandingkan dengan TPS lainnya yang ada di kelurahan ini berjumlah 1.199 orang.Jadi, dengan demikian jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2.490 orang.

2. Sampel

Menurut Koentjaraningrat (1977: 115), bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah obyek sesungguhnya dari suatu penelitian dan metodologi untuk menyeleksi individu-individu masuk ke dalam sampel yang representatif disebut sampling. Pada penelitian ini, untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus Isaac dan Michael dan tabel panduan (Sugiyono, 2012:87) sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 . N . P . Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 . P . Q}$$

Keterangan :

λ^2 = dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

P = Q = 0,5. d = 0,05. s = Jumlah Sampel

Tabel 7. Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi tertentu dengan Taraf Kesalahan 1%, 5%, 10%.(Sumber :Sugiyono 2012:89)

N	S (%)			N	S (%)		
	1	5	10		1	5	10
10	10	10	10	800	363	243	202
15	15	14	14	850	373	247	205
20	19	19	19	900	382	251	208
30	29	28	27	1.000	399	258	213
35	33	32	31	1.100	414	265	217
40	38	36	35	1.200	427	270	221
45	42	40	39	1.300	440	275	224
50	47	44	42	1.400	450	279	227
55	51	48	46	1.500	460	283	229

60	55	51	49	1.600	469	286	232
65	59	55	53	1.700	477	289	234
70	63	58	56	1.800	485	292	235
75	67	62	59	1.900	492	294	237
80	71	65	62	2.000	498	297	238
85	75	68	65	2.200	510	301	241
90	79	72	68	2.400	520	304	243
95	83	75	71	2.600	529	307	245
100	87	78	73	3.000	543	312	248
110	94	84	78	3.500	558	317	251
120	102	89	83	4.000	569	320	254
130	109	95	88	4.500	578	323	255
140	116	266	92	5.000	586	326	257
150	122	105	97	6.000	598	329	259
160	129	110	101	7.000	606	332	261
170	135	114	105	8.000	613	334	263
180	142	119	108	9.000	618	335	263
190	148	123	112	10.000	622	336	263
200	154	127	115	15.000	635	340	266
210	160	131	118	20.000	642	342	267
220	165	135	122	30.000	649	344	268
230	171	139	125	40.000	653	345	269
240	176	142	127	50.000	655	346	269
250	182	146	130	75.000	658	346	270
260	187	149	133	100.000	659	347	270
280	197	155	138	150.000	661	347	270
290	202	158	140	200.000	662	347	270
300	207	161	143	250.000	662	348	270
320	216	167	147	300.000	662	348	270
340	225	172	151	350.000	663	348	270
360	234	177	155	400.000	663	348	270
380	242	182	158	450.000	663	348	270
400	250	186	162	500.000	663	348	270
420	257	191	165	550.000	663	348	270
440	265	195	168	600.000	663	348	270
460	272	198	171	650.000	663	348	270
480	279	202	173	700.000	663	348	270
500	285	205	176	750.000	663	348	271
550	301	213	182	800.000	663	348	271
600	315	221	187	850.000	663	348	271
650	329	227	191	900.000	663	348	271
700	341	233	195	1.000.000	663	348	271

(Sumber : Sugiyono, 2012:87)

Berdasarkan panduan tabel di atas, maka banyak responden yang akan diteliti sebanyak 245 responden untuk Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung. Sampel meruapakan masyarakat yang teradaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Way urang dan Kelurahan Bumi Agung pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *proportional area random sampling*, dimana sampel yang di ambil di masing-masing kelurahan sebanding dengan sub populasi di setiap TPS masing-masing kelurahan. Sedangkan untuk menentukan banyaknya sampel di setiap TPS untuk masing-masing kelurahan digunakan rumus :

$$Nh = \frac{Ni\ x\ n}{N}$$

Keterangan :

Nh : banyaknya sampel yang dibutuhkan dari setiap kelompok

n : jumlah sampel yang mewakili populasi

Ni : banyaknya sub populasi dari setiap kelompok

N : jumlah populasi

Berdasarkan rumus di atas maka didapat sampel dari setiap TPS adalah :

Tabel. 8. Jumlah sampel Kelurahan Way Urang dibagi per TPS

No	TPS	Sub Populasi	Proportional Random Sampling	Sampel
1	7	443	$\frac{443\ x\ 245}{2.490}$	43
2	13	392	$\frac{392\ x\ 245}{2.490}$	38
3	14	364	$\frac{364\ x\ 245}{2.490}$	36
Jumlah Smapel				117

(sumber : diolah oleh peneliti)

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka sampel untuk Kelurahan Way Urang dalam penelitian ini yang di distribusikan pada masing-masing TPS berjumlah 117 orang yang tersebar di tiga TPS terpilih dengan porsi yang berbeda-beda.

Tabel 9. Jumlah sampel Kelurahan Bumi Agung dibagi per TPS

No	TPS	Sub Populasi	Proportional Random Sampling	Sampel
1	2	372	$\frac{372\ x\ 245}{2.490}$	37
2	4	738	$\frac{738\ x\ 245}{2.490}$	73
3	7	181	$\frac{181\ x\ 245}{2.490}$	18
Jumlah Smapel				128

(sumber : diolah oleh peneliti)

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka sampel untuk Kelurahan Way Urang dalam penelitian ini yang di distribusikan pada masing-masing TPS berjumlah 117 orang yang tersebar di tiga TPS terpilih dengan porsi yang berbeda-beda

I. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)

   Menurut Koentjaraningrat (1977:215) mengungkapkan kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang, kuesioner ini kemudian disebarkan kepada responden untuk diisi atau dijawab kemudian setiap pertanyaan disediakan alternatif jawaban berjenjang dan setiap jenjang pertanyaan diberi skor yang tidak sama pada setiap jenjang jawabannya.

2. Wawancara

   Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam mengenai alasan yang diberikan oleh responden di dalam pertanyaan terbuka yang terdapat dalam pertanyaan pada variabel partisipasi politik. Selain itu, peneliti mengklarifikasi jawaban responden tersebut kepada pihak yang menurut peneliti sangat mempuni untuk meberikan informasi terkait masalah partisipasi politik masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung seperti Lurah pada masing-masing kelurahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data melalui buku, jurnal, majalah, internet dan lain sebagiannya yang menjadi bahan referensi pendukung bagi peneliti. Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.
b. Hasil rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2015.
c. Hasil rekapitulasi perhitungan saura perkelurahan pada pemelihan kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.
d. Hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden tahun 2014
e. Hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan legislatif tahun 2014

J. Teknik Pengolahan data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (*SPSS*) 16. Menurut Siregar (2013:86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. *Editting* adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.

2. *Coding* adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program *Microsoft exel* sebelum memasukkannya ke dalam program *SPSS* 16 yang berguna untuk memudahkan peneliti menginput data kedalam *SPSS* 16.

3. *Format Entry Data* di Program *SPSS 16* merupakan suatu proses pembuatan format pengerjaan data pada program *SPSS* sebelum nantinya data dimasukkan ke dalam komputer. Data tersebut digunakan untuk mengukur uji validitas dan reabilitas, uji hipotesis, dan data hasil kuesioner penelitian.

4. Pemindahan data adalah memasukkan data yang telah didapat (berupa kode) ke dalam mesin pengolah data yaitu *SPSS* 16, sehingga nantinya didapatkan hasil dari pengelolahan tersebut dalam bentuk tabel.

5. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

6. Penyajian data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

K. Skala Pengukuran

Skala dapat mengurutkan responden-responden ke dalam urutan ordinal dengan lebih tepat karena dalam proses tersebut diperhatikan intensitas bobot dari tiap pertanyaan (Singarimbun, 2008: 113). Dalam kuesioner setiap pertanyaan akan diberi 5 (lima) alternatif jawaban yaitu a, b, c, d, dan e dengan skor masing-masing. Responden diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang ada. Untuk setiap jawaban diberi skor masing-masing jawaban sebagai berikut:

1) Untuk alternatif jawaban a diberi skor 5
2) Untuk alternatif jawaban b diberi skor 4
3) Untuk alternatif jawaban c diberi skor 3
4) Untuk alternatif jawaban d diberi skor 2
5) Untuk alternatif jawaban e diberi skor 1

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap masing-masing alternatif apakah tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka dapat ditentukan kelas intervalnya, dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyak Bilangan}}$$

Maka diperoleh :

$$\frac{5-1}{5} = 0.80$$

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing masing variabel yaitu :

a) Untuk kategori skor sangat tinggi = 4,21- 5,00
b) Untuk kategori skor tinggi = 3,41- 4,20
c) Untuk kategori skor sedang = 2,61- 3,40
d) Untuk kategori skor rendah = 1,81- 2,60
e) Untuk kategori skor sangat rendah =1,00 – 1,80

Untuk menentukan tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka jumlah jawaban responden akan ditentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyaan dan hasil pembagian tersebut akan dapat diketahui jawaban responden termasuk kategori mana.

L. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Singarimbun (2008: 122) validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin kita ukur. *instrumen* yang sahih atau valid berarti memiliki validitas tinggi, demikian sebaliknya.

Pengujian validitas ditujukan untuk melihat hubungan antar masing-masing item pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat dengan pengujian sebanyak 245 kuesioner. Apabila ada satu pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, sebaiknya direvisi atau dihilangkan dari daftar pertanyaan sehingga terlihat konsistensi dari masing-masing item pertanyaan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Metode uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah metode korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\left\{n\ \sum x^2 - (\sum x)^2\right\}\left\{n\ \sum y^2 - (\sum y)^2\right\}}}$$

Keterangan :

r = Nilai Validitas

x = Jumlah skor item pertanyaan

y = Jumlah skor total pertanyaan

n = Jumlah sampel yang akan diuji

Kriteria putusan:

Validitas *r* hitung > *r* tabel maka valid atau sahih

Validitas *r* hitung < *r* tabel maka tidak valid tidak sahih

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel X Status Sosial Ekonomi Kalkulasi

Item Pernyataan	**r hitung**	**r tabel**	**Kondisi**	**Hasil**
Pernyataan 1	0,891	0,124	0,891 > 0,124	Valid
Pernyataan 2	0,891	0.124	0,891 > 0,124	Valid
Pernyataan 3	0,752	0,124	0,752 > 0,124	Valid
Pernyataan 4	0,723	0,124	0,723 > 0,124	Valid
Pernyataan 5	0,617	0,124	0,617 > 0,124	Valid
Pernyataan 6	0,535	0.124	0,535 > 0,124	Valid
Pernyataan 7	0,521	0,124	0, 521 > 0,124	Valid
Pernyataan 8	0,195	0,124	0,195 > 0,124	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuisioner (2016)

Berdasarkan data pada tabel 10, dapat diketahui bahwa delapan perntanyaan yang diajukan mengenai variabel status sosial ekonomi di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Adapun perhitungan ini dilakukan dengan n = 245 pada taraf kesalahan 5%, maka dapa disimpulkan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur status sosial ekonomi (X) dinyatakan valid

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Y Partisipasi Politik Kalkulasi

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kondisi	Hasil
Pertanyaan 1	0,568	0,124	0,568 > 0,124	Valid
Pertanyaan 2	0,128	0,124	0,128 > 0,124	Valid
Pertanyaan 3	0,668	0,124	0,668 > 0,124	Valid
Pertanyaan 4	0,620	0,124	0,620 > 0,124	Valid
Pertanyaan 5	0,659	0,124	0,659 > 0,124	Valid
Pertanyaan 6	0,731	0,124	0,731 > 0,124	Valid
Pertanyaan 7	0,727	0,124	0,727 > 0,124	Valid
Pertanyaan 8	0,634	0,124	0,634 > 0,124	Valid
Pertanyaan 8	0,575	0,124	0,575 > 0,124	Valid
Pertanyaan 10	0,562	0,124	0,562 > 0,124	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuisioner (2016)

Berdasarkan data pada tabel 11, dapat diketahui bahwa delapan pertanyaan yang diajukan mengenai variabel partisipasi politik adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Adapun perhitungan ini dilakukan dengan n = 245 pada taraf kesalahan 5%, maka dapat disimpulkan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukut partisipasi politik (Y) dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Sebenarnya realibilitas dapat diartikan memilki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur memiliki realibilitas bila hasil pengukurannya relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh peneliti yang sama atau peneliti lainnya. Dalam penelitian ini instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terbuka yang memuat pertanyaan penting untuk mengetahui data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu cara lainnya adalah

memberikan pertanyaan terbuka terkait masalah yang dikira memerlukan sebuah alasan atau di ketahui lebih dalam lagi.

Menurut Arikunto (2002:171) untuk mencari reliabilitas keseluruhan item adalah dengan mengoreksi angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus Ko efisien Alfa (*CronBach*) yaitu:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1}\right]\left[1\ \frac{\sum \sigma_i^2}{\sum \sigma_t^2}\right]$$

Keterangan:

α = Nilai reliabilitas

K = Jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma_i^2$= Nilai varians masing-masing item

$\sum \sigma_t^2$= Varians total

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (*CronBach*) didapatkan maka nilai tersebut dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai Alfa lebih kecil dari angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Sebaliknya Jika nilai hitung korelasi *product moment* lebih besar dari angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut reliabel.

Tabel 12. Hasil Uji Reabilitas Kelurahan Way Urang

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
Status Sosial Ekonomi	0,693 > 0,182	Reliabel
Partisipasi Politik	0,835 > 0,182	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuisioner (2016)

Berdasarkan hasil tabel 12 di atas, maka pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik di Kelurahan Way Urang dapat dinyataka reliabel.

Tabel 13. Hasil Uji Reabilitas Kelurahan Bumi Agung

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
Status Sosial Ekonomi	0,275 > 0,182	Reliabel
Partisipasi Politik	0,779 > 0,182	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuisioner (2016)

Berdasarkan hasil tabel 13 di atas, maka pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik di Kelurahan Bumi Agung dapat dinyataka reliabel.

Tabel 14. Hasil Uji Reabilitas Kalkulasi

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
Status Sosial Ekonomi	0,652 > 0,124	Reliabel
Partisipasi Politik	0,819 > 0,124	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuisioner (2016)

Berdasarkan hasil tabel 14 di atas, maka pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik hasil kalkulasi antara Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung dapat dinyataka reliabel.

M. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:243) dalam penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Korelasi

   Uji korelasi digunakan untuk dapat melihat besaran hubungan antara status sosial ekonomi (X) terhadap partisipasi politik (Y). Pada panelitian koefisien korelasi akan di uji menggunakan teknik *Pearson Correlation*. Untuk mempermudah peneliti dalam menguji terkait masalah korelasi, alat bantu yang digunakan untuk dapat mengetahui besaran nilai korelasi (hubungan) status sosial ekonomi dan partisipasi politik yaitu dengan bantuan *SPSS* 16.00.

2. Uji Regresi

   Menurut Sugiyono (2009: 188) regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel X dengan variabel Y. Adapun rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Nilai variabel bebas yang diramalkan

a = Konstanta bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

x = Nilai variabel independen

Selain itu menurut (Kasmadi dan Sunariah, 2014:135) mengungkapkan bahwa setelah persamaan regresi telah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah perlunya dilakukan uji signifikansinya. Pengujian siginfikansi bertujuan untuk melihat keberartian konstanta pada persamaan regresi dan pengujian signifikansi dihitung menggunakan p value Sig dengan pertimbangan Sebagai berikut :

Ho : Regresi hubungan variabel X dan Y tidak signifikan

Ha : Regresi hubungan variabel X dan Y signifikan

Adapun kriterian pengambilan kepetusannya adalah sebagai berikut :

a) Bila P Value Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak dan regresi hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik tidak signifikan.

b) Bila P Value Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima dan artinya regresi hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik signifikan.

3. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005) uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Caranya melihat *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normalnya.

N. Uji Hipotesis

1. Pengujian Parsial (Uji t)

Menurut (Sugiyono, 2010:262) mengungkapkan statistik inferensial digunakan untuk menguji taraf signifikasi misalnya uji t pada tabel t, Uji F pada tabel F. Statistik ini menggunakan rumus Uji “t” :sebagai berikut :

$$t_{hit} = r\sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya pasangan rank (sampel)

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat keabsahan (dk = n-2)

Menurut Sugiyono (2007), setelah diketahui standard eror dari koefisien regresi dan harga t hitung maka signifikasi koefisien regresi dapat diketahui atas dasar kriteria sebagai berikut:

a) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan taraf kesalahan 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak adanya pengaruh secara parsial status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik.

b) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ tabel dengan taraf kesalahan 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya adanya pengaruh secara parsial status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik.

Sampel penelitian ini berjumlah 245 orang yang terbagi atas dua Kelurahan, yakini Kelurahan Way Urang berjumlah 117 orang dan Kelurahan Bumi Agung 128 orang, dilihat pada tabel t, nilai t tabel pada sampel 245 orang dengan taraf signifikan 5% bernilai.

2. Uji Stimultan (F)

Menurut Sugiyono (2005: 219) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Y), adapun rumus yang digunakan untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut sebagai berikut:

$$f = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Tahap-tahap pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui hipotesis nol dan hipotesis alternative

Ho: b1=b2=0 Status sosial ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap partisipasi politik masyarakat.

Ho: b1≠b2≠0 Status sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap partisipasi politik masyarakat.

b) Pengambilan Keputusan

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% (α = 0,05). Apabila nilai $F_{hitung} \geq$ dari nilai F_{tabel}, maka berarti variabel bebasnya secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama diterima.

Selain itu menurut (Kasmadi dan Sunariah, 2014:136) mengungkapkan bahwa untuk menentukan hipotesis nihil atau hipotesis alternatif yang diterima selain membandingkan nilai F_{hitung} dan F tabel juga melakukan uji linearitas dengan mebandingkan harga signifikansi dengan taraf kesalah 5% (a = 0,05). Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

a) Bila harga Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak dan artinya tidak adanya pengaruh secara simultan status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik.

b) Bila harga Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima dan artinya adanya pengaruh secara simultan status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik.

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Lampung Selatan

1. Keadaan Umum

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945, dalam Undang-Undang Dasar tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan Kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, lahirlah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, yang pada hekekatnya adalah Undang-Undang pemerintah di daerah yang pertama. Isinya antara lain mengembalikan kekuasaan pemerintahan di daerah kepada aparatur berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu, untuk menegakkan pemerintahan di daerah yang rasional dengan mengikut sertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat.

Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya sebagai berikut:

1. Propinsi Daerah Tingkat I
2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II
3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, maka lahirlah Propinsi Sumatera Selatan dengan perpu nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950, yang dituangkan dalam perda Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950. Bedasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian otonomi kepada daerah bawahannya, diatur selanjutnya dengan Undang-Undang darurat nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 14 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan beserta DPRD-nya dan 7 (tujuh) buah dinas otonom. Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur pemerintahan kabupaten, lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948.

Kemudian untuk lebih sempurnanya sistem pemerintahan daerah, lahirlah Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif daripada:

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1945,
2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1948,
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 1957,
4. Penpres nomor 6 tahun 1959, dan
5. Penpres nomor 5 tahun 1960.

Selanjutnya, karena Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang sifatnya lebih luas dari Undang-Undang nomor 18 tahun 1965. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang pemerintahan saja, tetapi lebih luas dari itu, termasuk dinas-dinas vertikal (aparat pusat di daerah) yang diatur pula di dalamnya.

Selain itu, Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 diperkuat dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2008. Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan

bangsa. Adapun beberapa 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan adalah Sebagai berikut :

a) Kecamatan Natar,
b) Kecamatan Tanjung Bintang,
c) Kecamatan Kalianda,
d) Kecamatan Sidomulyo,
e) Kecamatan Katibung,
f) Kecamatan Penengahan,
g) Kecamatan Palas,
h) Kecamatan Jati Agung,
i) Kecamatan Ketapang,
j) Kecamatan Sragi,
k) Kecamatan Rajabasa,
l) Kecamatan Candipuro,
m) Kecamatan Merbau Mataram,
n) Kecamatan Bakauheni,
o) Kecamatan Tanjung Sari,
p) Kecamatan Way Sulan, dan
q) Kecamatan Way Panji.

2. Letak Kabupaten Lampung Selatan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° 14$^{'}$ sampai dengan 105° 45’ Bujur Timur dan 5° 15’ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung selatan seperti halnya daerah – daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu teluk Lampung. Didalam Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu pelabuhan panjang, dimana kapal – kapal dalam luar negeri dapat merapat. Secara umum , pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, pelabuhan panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Kabupaten Lampung selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 210.974 Ha, dengan kantor pusat pemerintahan di daerah Kota Kalianda/Kecamatan Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh menteri dalam negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu terjadi pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan menjadi daerah Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya pada tahun 2006, terjadi pemekaran kembali untuk daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kabupaten Pesawaran.

3. Sejarah tingkat partisipasi Kabupaten Lampung Selatan

a). Pemilihan Gubernur tahun 2008	44,61%
b). Pemilihan Legislatif tahun 2009	77,44%
c). Pemilihan Presiden tahun 2009	77,53%
d). Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010	72,82%
e). Pemilihan Legislatif tahun 2014	74,30%
f). Pemilihan Gubernur tahun 2014	74,32%
g). Pemilihan Presiden tahun 2014	73,06%
h). Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015	67,40%

(Sumber : KPUD Lampung Selatan, diolah peneliti)

B. Sejarah Kecamatan Kalianda

1. Keadaan Umum

Kecamatan Kalianda merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Kalianda merupakan sebuah kecamatan yang terbentuk dari buah hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Bintang yang pada tahun 2011 berjumlah penduduk 80.831 jiwa dan 21.370 rumah tangga.

Kecamatan Kalianda terbentuk berdasarkan Surat Ketetapan Residen Lampung No.153/D/1952 yang dikelurkan pada tanggal 3 September 1952. Kecamatan Kalianda terbagi atas tiga Kelurahan dan dua puluh empat Desa yaitu :

a) Kelurahan Kalianda,

b) Kelurahan Bumi Agung,

c) Kelurahan Way Urang,

d) Desa Kedaton,

e) Desa Jondong,

f) Desa Tengkujuh

g) Desa Pauh Tanjung Iman,

h) Desa Maja,

i) Desa Sumur Kumbang,

j) Desa Buah Berak,

k) Desa Kesugihan,

l) Desa Pematang,

m) Desa Kecapi,

n) Desa Babulang,

o) Desa Sukaratu,

p) Desa Palembapang,

q) Desa Taji Malela,

r) Desa Marga Catur,

s) Desa Sukatani,

t) Desa Canggu,

u) Desa Merak Belantung,

v) Desa Gunung Terang,

w) Desa Munjuk Sempurna,

x) Desa Bulok,

y) Desa Agom,

z) Desa Negeri Pandan,

aa) Desa Taman Agung,

Pada Tahun 2012 sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 18 tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sidomukti Kecamatan Ketapang dan Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Sealatan, maka Jumlah Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kalianda berjumlah empat Kelurahan dan dua puluh enam Desa.

Adapun nama-nama camat yang pernah menjabat di Kecamatan Kalianda antara lain :

a) Muhamd Yusuf	Tahun 1971-1972
b) Drs. Herman Sanusi	Tahun 1972-1974
c) Durai Karim	Tahun 1974-1976
d) R. Werta Hamid	Tahun 1976-1978
e) Drs. Fuadi Usman	Tahun 1978-1982
f) Syahrin, S.H	Tahun1982-2984
g) M. Husni Jaya	Tahun 1984-1987
h) Drs. Ridwan Basah	Tahun 1987-1989
i) Drs. Ridwan Nawawi	Tahun 1989-1991
j) Maliki Muktar	Tahun 1991-1998

k) Drs. Marsidi Hasan Tahun 1998-1999

l) Drs. Tantan Sukmantara Tahun 1999-2001

m) Drs. Romudin Adam Tahun 2001-2006

n) Drs. Marsidi Hasan Tahun 2006-2007

o) Drs. Muclisin. Hi Tahun 2007-2009

p) Maturidi Ismail, S.H Tahun 2009-2010

q) Drs. M. Darmawan Tahun 2010-2010 (3 Bulan)

r) Drs. Hi. Burhanudin, MM Tahun 2010-2011

2. Topografi Kecamatan Kalianda

Secara topografi wilayah Kecamatan Kalianda dengan luas wilayah kurang lebih 215,87 Ha/m^2, dengan daerah daratan yang merupakan daerah pertanian padi, palawijaya, dengan status tanah kawasan hutan produksi dan tanah marga. Penggunaan tanah dalam wilayah Kecamatan Kalianda merupakan lahan kering perladangan, sawah tadah hujan, hutan negara, dan perkebunan rakyat. Adapun batas dari wilayah Kecamatan kalianda adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sidomulyo

b) Sebelah Selatan berbtarasan dengan Kecamatan Rajabasa

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Penengahan dan Palas

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Teluk Betung

3. Sejarah Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kalianda

Adapun data yang diperoleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Selatan mengenai sejarah tingkat partisipasi politik masyarakat Kemcatan Kalianda adalah sebagai berikut :

1. Pemilu Legislatif 2014 74%
2. Pemilu Presiden 2014 71%
3. Pemilihan Kepala Daerah 2015 66%

(Sumber :KPUD Kabupaten Lampung Selatan, diolah peneliti)

C. Sejarah singkat Kelurahan Way Urang

1. Keadaan Umum

Pada tahun 1817, datang warga Pagar Ruyung dibawah pimpinan Kahula Hulu Balang mendirikan sebuah perkampungan, dan diberi nama Kampung Labuhan Ratu. Suatu saat Kahulu Hulu Balang merendam sabut/ijuk untuk membuat tali tambang. Beberapa hari kemudian Kahula Hulu Balang mengangkat sabut/ijuk tersebut dari dalam air. terasa begitu berat sekali. Setelah dilihat ternyata sabut/ijuk tersebut dikerumuni oleh udang (ukhang). Dari cerita singkat itu terciptalah sebuah nama yang menggantikan Kampung Labuhan Ratu menjadi Way Ukhang. Way berarti air, Ukhang berarti udang.

Pada tahun 1865, Kampung Way Ukhang dikukuhkan menjadi Kampung Way Urang. warga Kampung Way Urang yang mayoritas beragama Islam mulai menata adat istiadatnya. Pada keturunan ke 5 (lima) dari Kahula Hulu Balang yaitu Abdullah, Gelar Dalom Kesuma Khatu, menata adat Way

Ukhang yang berkedudukan di Lamban Balak dengan julukan Bandar Marga Legun yang kemudian membentuk 4 (empat) paksi yaitu:

a) Paksi Tengkujuh
b) Paksi Maja
c) Paksi Canggu
d) Paksi Kesugihan

Masing-masing paksi mempunyai punggawa-punggawa tata kedudukan adat sampai sekarang, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Dalom Kesuma Ratu, turun ke
b) Pangeran Mangku Bumi, turun ke
c) Pangeran Ratu Sangun Ya Bandar, turun ke
d) Pangeran Mangku Bumi (Rustam Efendi)

Masa kepemimpinan kepala kampung Muslim Gelar Dalom Kesuma Ratu, wilayah Kampung Way Urang menjadi kepala-kepala suku sebagai berikut:

a) Kepala Suku Karang Agung
b) Kepala Suku Cina Girang
c) Kepala Suku Simpur
d) Kepala Suku Lubuk
e) Dan lain-lain sampai Suwak

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Kampung dan Kelurahan Way Urang atau sekarang yang disebut sebagai Lurah Kelurahan Way Urang adalah sebagai berikut:

1. Dalom Kesuma Ratu	(1909-1917)
2. Raja Mangku Alam	(1917-1931)
3. Muslim Gelar Dalom Kesuma Ratu	(1931-1941)
4. Raja Mangku Alam	(1941-1957)
5. Raden Sebuay	(1957-1966)
6. Achmad Tumenggung Niti Jaman	(1966-1979)
7. Yahya	(1979-1982)
8. PLH. Zubaidi Zukri, BA	(1982-1983)
9. Raden Purwa Tina	(1983-1990)
10. M.Ramli, BA	(1990-1997)
11. M.Toha Pasa,BA	(2000-2005)
12. Dany Wahyudi, S.STP	(1999-2000)
13. Drs, Kamaluddin Lana	(2000-2005)
14. Azwar MU, SE.	(2005- 2010)
15. Al Ihsan Iskafi, SE.	(2010 - 2015)
16. Jaelani, S.STP.,M.H	(2015 s/d sekarang)

2. Topografi Kelurahan Way Urang

Kelurahan Way Urang merupakan kelurahan yang terdekat letaknya dengan wilayah perkantoran pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Kelurahan Way Urang mempunyai luas lahan yang dimiliki sebesar 1.000 Ha/m^2.

Terbagi atas luas pemukiman 843 Ha/m^2 , luas lahan persawahan 92 Ha/m^2, luas lahan perkebunan 20 Ha/m^2 , luas lahan pemakaman 15 Ha/m^2 , luas pekarangan 13 Ha/m^2, dan luas lahan perkantoran 13 Ha/m^2 .

Kelurahan Way Urang sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Kalianda.

Penduduk Kelurahan Way Urang berjumlah 1.192 jiwa, dan dibagi atas sepuluh lingkungan. Terdapat 1.653 jiwa untuk lingkungan satu, 434 jiwa untuk lingkungan dua, 989 jiwa untuk lingkungan tiga, 1.856 jiwa untuk lingkungan empat, 567 jiwa untuk lingkungan lima, 1.652 jiwa untuk lingkungan enam, 634 jiwa untuk lingkungan tujuh, 1.128 jiwa untuk lingkungan delapan, 654 jiwa untuk lingkungan sembilan, dan 1.192 jiwa untuk lingkungan sepuluh.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Maasyarakat Kelurahan Way Urang

Keadaan sosial ekonomi di Kelurahan Way Urang dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Kelurahan Way Urang bekerja sebagai birokrat/PNS dan masuk dalam kategori masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah keatas. Adapun beberap data yang diperoleh peneliti mengenai jumlah pekerjaan yang dimiliki masyarakat Kelurahan Way Urang adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Way Urang.

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Pekerjaan			
		PNS	Guru	TNI	Pensiunan
1	Kelurahan Way Urang	224	32	9	20

(Sumber : Kecamatan Kalianda 2010, diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Way Urang sejumlah 234 orang bekerja sehari-hari sebagai seorang birokrat/PNS di kantor Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, 32 orang bekerja sebagai PNS namun sebagai soerang guru, 9 orang bekerja sebagai TNI, dan 20 orang pensiunan.

D. Sejarah Kelurahan Bumi Agung

1. Keadaan Umum

Pada tahun 1900 kurang lebih sesudah peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang terletak di selat sunda-teluk lampung tahun 1983, secara resmi dinyatakan berdirinya sebuah kampung yang disebut dengan sebutan Kampung Bumi Agung. Mayoritas penduduk Kampung Bumi Agung pada saat itu adalah para pendatang dari kelompok suku kecil yang kemudian bergabung dan membentuk suatu kumpulan Umbulan yang mempunyai wilayah binaan terpisah berjauhan yang berpuluh-puluh tahun lamanya. Hingga pada saat ini Kampung Bumi Agung berdiri dan berubah menjadi sebuah wilayah kelurahan yang disebut Kelurahan Bumi Agung. Kelurahan Bumi Agung merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan

Kalianda. Adapun nama-nama lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Bumi Agung adalah sebagai berikut :

a)	Mahyudin Alwi	1980-1990
b)	Maryantho, BA	1990-1992
c)	Hamim, BA	1992-1995
d)	Mahyudin Alwi	1995-2002
e)	Drs. Bertus Muhidin	2002-2004
f)	Setiawan, Amd	2004-2007
g)	Ahyat Kamal	2007-2010
h)	Rusnawi, S.E	2010 s/d Sekarang

2. Topografi Kelurahan Bumi Agung

Berdasrkan data yang diperoleh dari Kelurahan Bumi agung, maka dapat terlihat luas lahan Kelurahan Bumi Agung terbagi atas, 30 Ha wilayah pemukiman berbukit, 30 Ha wilayah pegunungan, 60 Ha wilayah lereng, 5 Ha wilayah kawasan perkotaan, 3 Ha wilayah kawasan bisinis/pertokoan, 12 Ha wilayah kawasan campuran, dan 12 Ha wilayah kawasan wisata.

Jika Kelurahan Way Urang identik dengan lahan perkantorannya, dengan ditunjukan bahwa letak Kelurahan Way Urang dekat dengan kawasan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, namun Kelurahan Bumi Agung lebih identik dengan kawasan bisinis/pertokoan dan kawasan wisata. Berdasarkan hasil pengamatan, benar bahwa kawasan bisinis.perotokoan untuk Wilayah Kecamatan Kalianda terletak di Wilayah Kelurahan Bumi Agung.

Mengenai batas wilayah Kelurahan Bumi Agung, sebelah utara kawasan Kelurahan Bumi Agung berbatasan dengan Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Maja Kecamatan Kalianda, sebalah timur berbatasan dengan Desa Buah Berak Kecamtan Kalianda, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda.

Kelurahan Bumi Agung memiliki penduduk berjumlah 3.870 jiwa, yang terbagi atas enam lingkungan. Terdapat 916 jiwa untuk lingkungan satu, terdapat 447 jiwa untuk lingkungan dua, 720 jiwa untuk lingkungan tiga, 439 jiwa untuk lingkungan empat, 1.076 jiwa untuk lingkungan lima, dan 272 jiwa untuk lingkungan enam.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Kelurahan Bumi Agung

   Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Bumi agung jika dibandingkan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Way Urang sangatlah jauh berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat bumi agung dan nantinya akan mengacu kepada sebuah pendapatan, yang selanjutnya mampu mengelompokan masyarakat Kelurahan Bumi Agung masuk kedalam kelompok masyarakat yange memiliki status sosial ekonomi menengah kebawah. Perbedaan lain yang mampu ditunjukan adalah dengan jumlah yang sangat minin masyarakat yang bekerja sebagai PNS jika dibandingkan dengan masyarakat Kelurahan Way Urang. Data yang diperoleh adalah sebegai berikut :

Tabel 16. Jenis Pekerjaan Masayarakat Kelurahan Bumi Agung.

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Pekerjaan			
		PNS	Guru	TNI	Pensiunan
1	Kelurahan Bumi Agung	18	7	3	5

(Sumber : Kecamatan Kalianda 2010, diolah peneliti)

Berdasrkan tabel 16 di atas, maka dapat terlihat bahwasanya masyarakat Kelurahan Bumi Agung hanya 18 orang yang bekerja sebagai PNS di kantor Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, 7 orang sebagai PNS (guru), 3 orang bekerja sebagai TNI, dan 5 orang pensiunan. Masyarakat di Kelurahan bumin agung memiliki Jumlah yang sangat sedikit yang bekerja sebagai PNS sehari-hari jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Way Urang dengan jumlah 266 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Besarnya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik di Kelurahan Way Urang adalah sebesar 57,2% , sedangkan Kelurahan Bumi Agung adalah sebesar 52,8%. Setelah dikalkulasikan data dari Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, besarnya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik menjadi sebesar 76,5%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

2. Indikator pada variabel status sosial ekonomi yang paling dominan mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015 di Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung adalah indikator ukuran kekuasaan/jabatan dengan nilai koefisien determinasi 0,648 atau 64,8%.

3. Bentuk partisipasi yang paling terlihat berbeda antara masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung adalah pada bentuk partisipasi pemberian suara atau *voting*, masyarakat Kelurahan Way Urang angka partisipasi politik dalam bentuk ini lebih dominan tinggi dibandingkan dengan masyarakat Kelurahan Bumi Agung. Namun, hal tersebut disebabkan bukan karena kesadaran politik yang tinggi, melainkan karena faktor kepentingan mengenai kedudukan meraka di dunia kerjanya yang di usung oleh masyarakat Kelurahan Way Urang.

4. Faktor penyebab menurunnya angka partisipasi politik pada masyarakat di Kelurahan Way Urang dan Bumi Agung dikarenakan faktor kepercayaan atau *trust* terhadap suatu calon kepala daerah. Kepercayaan tersebut mulai memudar dipicu oleh sudah seringnya para calon kepala daerah yang terpilih dan berhasil duduk sebagai penguasa di daerah terkait sering kali mengingkari janji pada waktu dimana mereka masih berkompetisi di ajang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga masyarakat kecil yang merasa di rugikan, dan membuat mereka merasa teraleniasi dari kehidupan politik, sehingga masyarakat tersebut pun menjadi apatis dalam segala macam bentuk kegiatan pemilihan umum khususnya pada kegaiatan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015.

5. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak mampu menjadi acuan bagi penelitian yang akan mendatang. Hal tersebut di karenakan status sosial ekonomi merupakan bagian dari aspek sosiologis dan hanya bagian terkecil yang mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik, masih banyak faktor

lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik seperti faktor ideologis, psikologis dan lain sebagaiannya.

B. Saran

Berdasrkan hasil dan pembahasan, peneliti memberikan saran terkait pengaruh status sosial ekonomi terhadap pasrtisipasi politik yang terjadi di masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung adalah sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara pemilu, diharapakan agar memberi pendidikan mengenai politik khususnya bagi masyarakat yang mempunyai status sosial ekonomi menengah kebawah lebih intens lagi, guna dapat membangun kesadaran politik masyarakat tersebut. Sehingga dengan demikian, jika nantinya masyarakat status sosial ekonomi menengah kebawah dihadapkan dengan suatu kegiatan pemiliahan umum mereka akan berpartisipasi atas dasar kesadaran politik yang tinggi.

2. Kepada para peserta pemilu mulailah memikirkan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat status sosial ekonomi kebawah agar mereka tidak merasa teraleniasi dari kehidupan politik. Bahkan mereka tidak merasa hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan sang penguasa saja.

3. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung, mencoba memulai berpartisipasi atau ikut serta dalam segala macam bentuk kegiataan pemilihan umum berlandaskan kesadar politik yang tinggi, bukan lagi dikarenakan kepentingan-kepentingan pribadi, atau bahkan dikarenakan status sosial ekonomi yang dimiliki. Sehingga masyarakat Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung dapat dikatakan sebagai ketagori masyarakat pemilih cerdas.

4. Kepada calon peneliti yang akan mendatang, apabila ingin menliti seputaran masalah partisipasi politik agar mampu melihat dari aspek lainnya yang mungkin merupakan aspek yang mempengaruhi sebuah partisipasi politik masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rieneka cipta. Jakarta

Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

----------. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Gramedia.

Budiyanto.2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Erlangga.

Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Efriza. 2012. Political Explore: *Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung. Alfabeta.

Damsar Prof. 2010.*Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta.

Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.

Green, Jessica, and Bradnee Chambers. 2007. *The Politics of Participation in Sustainable Develpoment Governance*. Tokyo .United Nations University Press.

Govt. of Pakistan. (2008) *National Center for Educational Statistics.* Islamabad, Statistical Division.H.Jeanve , *Sociology of Education*, New Jersey, Englewood Cliffs. Psychological Bulletin, Vol 91(3), May 1982.

Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistematik*. Yogyakarta: Kanisius.

Huntington, Samuel P dan Nelson Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta. Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta*. Gramedia.

Kristiadi, J. 2006. *Darurat Partai politik.* Jakarta. *Ghalia Indonesia*.

Kaare, Svalastoga.1989.*Social Diferentiation*.Terjemahan Alimandau Su. Jakarta. Bina Aksara

Kasmadi dan Sunariah. 2014. *Panduan Modern Peneltian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta

Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta Rineka Cipta.

----------. 2014. *Pengantar Sosiologi Politik*.. Jakarta. Rineka Cipta.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Putman, D. Robert, 2002, *Democracies in Flix: The Evalution of social Capital in Contemporary Society*, Oxford University Press

Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Rachman, Fajroel. 2007. *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*. Jakarta. PT Gramedia.

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT Rajawali Pers.

Sanit, Arbi. 1995. *Sistem Politik Indonesia. Jakarta*. PT Raja Grafindo Persada.

Setiadi, Elly M & Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Kencana.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 2000. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Surabaya : Ghalia Indonesia.

Sudijono, Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang. RIKIP Press.

Sugiyono. 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media.

----------. 2007. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: CV Alfabeta.

----------. 2011. *Metode Penelitian Sosial (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

----------. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik* .Jakarta:PT Grasindo

Umar, Husein. 1998. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. Raja Grafindo.

Universitas Lampung. 2012. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Skripsi

Masyhar, Arif.2012. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Itensitas Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 (studi pada Kelurahan Yoserejo Kota Metro. Penerbit Universitas Lampung.

Sitompul, Novita Polina,2007. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (studi pada Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara). Penerbit Universitas Sumatera Utara.

Dokumentasi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak.

Hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015

Sumber internet

http://data.kpu.go.id/dpt2015.php

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/7544

http://data.kpu.go.id/hasil_analisis_dp4.php

http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/viewFile/342/40

(digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/index/assoc/HASH0152/…/doc.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2011).